



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis Berita Kasus Pagar Laut di Bekasi

ANALISIS BERITA KASUS PAGAR LAUT DI BEKASI

Judul Berita: Bareskrim Polri Tetapkan 9 Tersangka di Kasus Pagar Laut Bekasi Jurnalis: Rumondang Naibaho		
STRUKTUR SINTAKSIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>Headline</i>	Bareskrim Polri Tetapkan 9 Tersangka di Kasus Pagar Laut Bekasi	Tokoh utama dalam berita ini adalah Bareskrim Polri yang bertindak dalam menangani kasus pagar laut di Bekasi dengan menetapkan 9 tersangka. Judul ini mengarah pada proses hukum dan jumlah tersangka dalam kasus pagar laut di Bekasi. “9 tersangka” pada <i>headline</i> menunjukkan banyaknya tersangka sehingga membangun citra positif bagi Bareskrim Polri yang telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka.
<i>Lead</i>	Polisi telah menetapkan sembilan orang menjadi tersangka di kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi. Dua di antaranya kepala desa (kades) dan mantan Kades Segarajaya.	<i>Lead</i> tersebut masih berkaitan dengan judul berita yang menekankan pada aktor polisi sebagai fokus pemberitaan. <i>Lead dalam</i> berita ini berfokus pada unsur <i>who</i> yang menunjukkan polisi sebagai aktor.
Latar Informasi	Sebagai informasi, pada perkara ini polisi menemukan adanya 93 SHM yang dipalsukan di pagar laut Bekasi. Sertifikat tanah itu digadaikan kepada bank swasta.	Latar informasi tersebut sebagai informasi tambahan yang masih berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dalam berita dddini.

Kutipan Sumber	1. "Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, kemudian dari wasidik, kemudian dari penyidik madya, kita sepakat menetapkan sembilan orang tersangka," kata Djuhandhani kepada wartawan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/5/2025). 2. "Di samping itu bukti-bukti lain juga kita dapatkan dari labfor (laboratorium forensik), di mana pernah kami sampaikan bahwa ini adalah dengan modus merubah sertifikat, merubah sertifikat di mana diubah objek maupun subjek sertifikat tersebut," jelas Djuhandhani. 3. "Selanjutnya, penyidik akan melaksanakan upaya-upaya paksa yaitu dengan pemanggilan, pemeriksaan dan lain sebagainya, secepatnya agar segera dapat kita berkas dan untuk selanjutnya kami teruskan ke JPU," tutur dia. 4. "Betul, 93 sertifikat yang dipindahkan. Jadi seperti kami sampaikan dulu bahwa ini adalah objek yang dipindah, dimana sertifikatnya adalah sertifikat di darat kemudian dirubah subjek maupun objeknya, dipindah ke laut dengan luasan yang lebih luas lagi," pungkas dia. 5. Dirlidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebutkan penetapan tersangka dilakukan pihaknya setelah melakukan gelar perkara pada Kamis, 20 Maret 2025. 6. Djuhandhani menuturkan pihaknya telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dalam perkara itu. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah bukti kasus pemalsuan dokumen itu. 7. Selanjutnya, dia mengatakan para tersangka akan menjalani pemeriksaan. Keterangan mereka untuk melengkapi berkas perkara kasus itu.	Berita ini hanya memuat satu narasumber, yaitu Dirlidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro. Terdapat 4 kutipan langsung dan 3 kutipan tidak langsung dari narasumber. Kutipan tersebut menonjolkan pihak Bareskrim Polri sebagai aktor yang menangani kasus ini dengan menetapkan 9 tersangka sesuai dengan prosedur hukum.
Pernyataan	1. Polisi telah menetapkan sembilan orang menjadi dugaan tersangka di kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak	Dalam berita ini, wartawan menambahkan pernyataan pada bagian <i>lead</i> dan latar informasi. Pernyataan

	milik (SHM) pagar laut di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi. Dua di antaranya kepala desa (kades) dan mantan Kades Segarajaya. 2. Sebagai informasi, pada perkara ini polisi menemukan adanya 93 SHM yang dipalsukan di pagar laut Bekasi. Sertifikat tanah itu digadaikan kepada bank swasta.	tersebut memuat mengenai polisi yang menemukan bukti dan menetapkan tersangka. Pernyataan tersebut menonjolkan aktor polisi sebagai tokoh yang bertindak secara tegas dan bekerja secara serius untuk menangani kasus ini. Hal ini dapat mendukung citra positif polisi sebagai aktor yang telah bekerja secara serius dalam menangani kasus ini.
Penutup	"Betul, 93 sertifikat yang dipindahkan. Jadi seperti kami sampaikan dulu bahwa ini adalah objek yang dipindah, dimana sertifikatnya adalah sertifikat di darat kemudian diubah subjek maupun objeknya, dipindah ke laut dengan luasan yang lebih luas lagi," pungkask dia.	Penutup dari berita ini adalah kutipan sumber dari Dirlidipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, yang menyampaikan perubahan objek atau subjek dalam sertifikat yang dipalsukan.
STRUKTUR SKRIP		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>What</i>	Polisi telah menetapkan sembilan orang menjadi tersangka di kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi. Dua di antaranya kepala desa (kades) dan mantan Kades Segarajaya.	Apakah yang terjadi dalam berita tersebut?
<i>When</i>	Kamis, 20 Maret 2025	Kapan terjadi gelar perkara untuk kasus dugaan pemalsuan SHM pagar laut di Bekasi?
<i>Where</i>	Di laut Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi	Di mana terjadinya pemasangan pagar laut dalam berita tersebut?
<i>Who</i>	Polisi telah menetapkan sembilan orang menjadi tersangka di kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi. Dua di antaranya kepala desa (kades) dan mantan Kades Segarajaya.	Siapakah yang menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi?
<i>Why</i>	"Di samping itu bukti-bukti lain juga kita dapatkan dari labfor (laboratorium forensik), di mana pernah kami sampaikan bahwa ini adalah dengan modus merubah sertifikat, merubah sertifikat di	Mengapa 9 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi?

	mana diubah objek maupun subjek sertifikat tersebut," jelas Djuhandhani.	
<i>How</i>	1. "Di samping itu bukti-bukti lain juga kita dapatkan dari labfor (laboratorium forensik), di mana pernah kami sampaikan bahwa ini adalah dengan modus merubah sertifikat, merubah sertifikat di mana diubah objek maupun subjek sertifikat tersebut," jelas Djuhandhani. 2. Djuhandhani menuturkan pihaknya telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dalam perkara itu. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah bukti kasus pemalsuan dokumen itu. 3. Sebagai informasi, pada perkara ini polisi menemukan adanya 93 SHM yang dipalsukan di pagar laut Bekasi. Sertifikat tanah itu digadaikan kepada bank swasta.	Bagaimana pihak Bareskrim Polri mendapatkan bukti untuk menetapkan tersangka pada kasus pagar laut di Bekasi?
STRUKTUR TEMATIK		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Detail	1. "Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, kemudian dari wasidik, kemudian dari penyidik madya, kita sepakat menetapkan sembilan orang tersangka," kata Djuhandhani kepada wartawan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/5/2025). 2. Djuhandhani menuturkan pihaknya telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dalam perkara itu. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah bukti kasus pemalsuan dokumen itu. 3. Sebagai informasi, pada perkara ini polisi menemukan adanya 93 SHM yang dipalsukan di pagar laut Bekasi. Sertifikat tanah itu digadaikan kepada bank swasta	<i>Detail</i> dalam berita ini adalah Bareskrim Polri. Hal tersebut dikarenakan "Bareskrim Polri" dalam berita ini menjelaskan mengenai tindakan polisi mengenai kasus pagar laut di Bekasi yang menetapkan tersangka, melanjutkan penyelidikan, dan juga menemukan barang bukti.

Koherensi	Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebutkan penetapan tersangka dilakukan pihaknya setelah melakukan gelar perkara pada Kamis, 20 Maret 2025.	Koherensi kronologis: setelah. Koherensi kronologis menunjukkan alur polisi untuk menetapkan tersangka.
Bentuk Kalimat	1. Polisi telah menetapkan sembilan orang menjadi tersangka di kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi. 2. Djuhandhani menuturkan pihaknya telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dalam perkara itu. 3. Pada perkara ini polisi menemukan adanya 93 SHM yang dipalsukan di pagar laut Bekasi. 4. Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, kemudian dari wasidik, kemudian dari penyidik madya, kita sepakat menetapkan sembilan orang tersangka. 5. Sertifikat tanah itu digadaikan kepada bank swasta.	Bentuk kalimat aktif: menetapkan, menuturkan, menemukan. Bentuk kalimat pasif: dihadiri, digadaikan. Kalimat aktif dan pasif tersebut cenderung menunjukkan bahwa polisi telah melalui proses penanganan kasus berdasarkan hukum.
Kata Ganti	1. Djuhandhani menuturkan pihaknya telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dalam perkara itu. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah bukti kasus pemalsuan dokumen itu. 2. Selanjutnya, dia mengatakan para tersangka akan menjalani pemeriksaan 3. Kita sepakat menetapkan sembilan orang tersangka. 4. Keterangan mereka untuk melengkapi berkas perkara kasus itu.	1. Kata ganti kepemilikan: -nya. Kata “-nya” merujuk pada Bareskrim Polri 2. Kata ganti orang pertama jamak: kita. Kata “kita” merujuk pada Bareskrim Polri. 3. Kata ganti orang ketiga tunggal: dia. Kata “dia” merujuk pada Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro. 4. Kata ganti orang ketiga jamak: mereka. Kata “mereka” merujuk pada tersangka.
STRUKTUR RETORIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Kata/idiom	1. Polisi telah menetapkan sembilan orang menjadi tersangka di kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Desa Segarajaya,	1. Saksi: seseorang yang melihat atau mengetahui peristiwa secara nyata, kemudian ia dimintai keterangan. 2. Tersangka: orang yang diduga atau dicurigai

	Tarumajaya, Bekasi. Djuhandhani menuturkan pihaknya telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dalam perkara itu. 2. Dirlidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebutkan penetapan tersangka dilakukan pihaknya setelah melakukan gelar perkara pada Kamis, 20 Maret 2025. 3. "Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, kemudian dari wasidik, kemudian dari penyidik madya, kita sepakat menetapkan sembilan orang tersangka," kata Djuhandhani kepada wartawan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/5/2025). 4. Djuhandhani menuturkan pihaknya telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dalam perkara itu. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah bukti kasus pemalsuan dokumen itu. 5. "Di samping itu bukti-bukti lain juga kita dapatkan dari labfor (laboratorium forensik), di mana pernah kami sampaikan bahwa ini adalah dengan modus merubah sertifikat, merubah sertifikat di mana diubah objek maupun subjek sertifikat tersebut," jelas Djuhandhani. 6. Selanjutnya, dia mengatakan para tersangka akan menjalani pemeriksaan. 7. "Selanjutnya, penyidik akan melaksanakan upaya-upaya paksa yaitu dengan pemanggilan, pemeriksaan dan lain sebagainya, secepatnya agar segera dapat kita berkas dan untuk selanjutnya kami teruskan ke JPU," tutur dia. 8. Sebagai informasi, pada perkara ini polisi menemukan adanya 93 SHM yang dipalsukan di pagar laut Bekasi. Sertifikat tanah itu digadaikan kepada bank swasta.	3. Penyidik: pejabat polisi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. 4. Wasidik: unit dalam Polri yang bertugas untuk mengawasi proses penyidikan. 5. Labfor: unit dari bagian Polri yang bertugas untuk memeriksa bukti fisik. 6. Mengantongi: telah memiliki, memperoleh, memasukkan, menerima. 7. Pemalsuan: memalsukan, mengubah, meniru suatu hal. 8. Bukti: suatu yang nyata, benar, tanda. 9. Modus: metode, cara, teknik, pola. 10. Dipalsukan: ditiru, diubah, direkayasa. 11. Digadaikan: dipertaruhkan, dijaminkan, disandarkan. Kata dan frasa tersebut memperkuat legitimasi pemerintah karena kasus ini telah berada dalam pengawasan pihak berwajib.
--	---	--

Gambar



Gambar tersebut adalah Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo. Gambar tersebut dapat meningkatkan kesan bahwa informasi yang disampaikan oleh media adalah informasi yang resmi dan valid.



Judul Berita: KKP Ungkap Pagar Laut di Bekasi Tak Berizin, Pemilik Sudah Diketahui Jurnalis: Retno Ayuningrum		
STRUKTUR SINTAKSIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>Headline</i>	KKP Ungkap Pagar Laut di Bekasi Tak Berizin, Pemilik Sudah Diketahui	Judul tersebut menunjukkan dua tokoh utama dalam berita, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pemilik pagar laut di Bekasi. Namun, dalam berita ini belum disebutkan pemilik pagar di Bekasi. Pada <i>headline</i> berita ini terdapat frasa “Tak Berizin” yang menekankan bahwa pagar laut di Bekasi tidak memiliki izin berkegiatan sehingga melanggar aturan yang ditetapkan.
<i>Lead</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan pagar yang membentang di perairan Bekasi tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto.	<i>Lead</i> tersebut masih berkaitan dengan <i>headline</i> yang berfokus pada unsur <i>who</i> . KKP masih menjadi aktor dalam <i>lead</i> yang bekerja secara bersungguh-sungguh.
Latar Informasi	-	Berita ini tidak memuat latar informasi. Hal tersebut dikarenakan dalam berita ini hanya menyampaikan pemerintah telah melakukan tindakan untuk menangani kasus ini.
Kutipan Sumber	1. "Kita itu tanggal 19 Desember sudah kirim surat (dari) PSDKP. Jadi sekarang memang lagi ada proses penegakan hukum karena ada indikasi pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin KKPRL," kata Doni saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025). 2. "Pemiliknya kita tahu ini beda nih (dengan yang di Tangerang). Jadi pemiliknya kita tahu, tapi saya nggak bisa sebut siapa pemiliknya. Kalau kita sih sudah berkegiatan	Dalam berita ini hanya memuat satu narasumber, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto. Terdapat 6 kutipan sumber yang berupa 3 kutipan langsung dan 3 kutipan tidak langsung. Kutipan sumber tersebut menekankan pada tindakan pemerintah yang serius dan tegas dalam menangani kasus ini.

	surat, sudah memberikan permintaan untuk penghentian kegiatannya," imbuh Doni. 3. "Ya belum. Karena ini kita mau follow up lagi. (Ada penyegehan ke depan?) Pokoknya tenang aja, kita pasti (penegakkan hukum). Saya cuma bisa bilang gini, Pak Menteri kalau urusan ekologi, urusan penegakan hukum, terutama tentang pemanfaatan ruang laut yang tidak berizin, sudah banyak yang beliau lakukan penyegehan laut oleh PSDKP. Di resort Batam, terus kapal pasir. Jadi kalau urusan kayak gini, tetap harus hati-hati. Karena nggak bisa gebyah uyah, kadang-kadang yang kita hadapin perusahaan, kadang-kadang warga yang nggak paham," imbuh Doni. 4. Doni mengatakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menyurati pemilik pagar laut di Bekasi lantaran tidak mengantongi izin KKPRL dari KKP. Surat tersebut telah dilayangkan sejak 19 Desember 2024 lalu. 5. Doni menjelaskan pemilik pagar laut di Bekasi berbeda dengan pemilik pagar laut di Tangerang. Meski begitu, dia belum mau membeberkan nama pemiliknya karena masih dalam proses investigasi. 6. Doni pun menerangkan sampai saat ini pihaknya belum menerima surat balasan dari pemilik pagar laut di Bekasi. Ke depan, KKP akan tetap menegakkan hukum apabila tak kunjung mendapat balasan. Salah satu upaya penegakkannya dengan penyegehan.	
Pernyataan	-	Dalam berita ini tidak memuat pernyataan dari wartawan. Berita ini hanya memuat pernyataan sebagai kutipan sumber dari narasumber.
Penutup	"Ya belum. Karena ini kita mau follow up lagi. (Ada penyegehan ke depan?) Pokoknya tenang aja, kita pasti (penegakkan hukum).	Penutup dalam berita ini adalah kalimat langsung yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan

	Saya cuma bisa bilang gini, Pak Menteri kalau urusan ekologi, urusan penegakan hukum, terutama tentang pemanfaatan ruang laut yang tidak berizin, sudah banyak yang beliau lakukan penyevelan laut oleh PSDKP. Di resort Batam, terus kapal pasir. Jadi kalau urusan kayak gini, tetap harus hati-hati. Karena nggak bisa gebyah uyah, kadang-kadang yang kita hadapin perusahaan, kadang-kadang warga yang nggak paham," imbuh Doni.	Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto. Kutipan sumber tersebut sebagai penutup berita dapat memberikan kesan bahwa pemerintah memiliki sikap tegas dan dapat dipercaya untuk menangani kasus ini.
STRUKTUR SKRIP		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>What</i>	Pagar yang membentang di perairan Bekasi tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).	Apakah yang terjadi dalam berita tersebut?
<i>When</i>	Sejak 19 Desember 2024.	Kapan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menyurati pemilik pagar laut di Bekasi?
<i>Where</i>	Di Bekasi	Dalam berita tersebut, di laut manakah pagar membentang tanpa izin?
<i>Who</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan pagar yang membentang di perairan Bekasi tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto.	Siapakah yang menyampaikan pagar yang membentang di perairan Bekasi tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dalam berita tersebut?
<i>Why</i>	Doni mengatakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menyurati pemilik pagar laut di Bekasi lantaran tidak mengantongi izin KKPRL dari KKP.	Mengapa Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menyurati pemilik pagar laut di Bekasi?
<i>How</i>	1. Doni pun menerangkan sampai saat ini pihaknya belum menerima surat balasan dari pemilik pagar laut di Bekasi. Ke depan, KKP akan tetap menegakkan hukum apabila tak kunjung mendapat balasan. Salah satu upaya penegakkannya dengan penyevelan.	Bagaimanakah tindakan KKP jika belum mendapatkan balasan surat dari pemilik pagar laut di Bekasi?

	2. "Ya belum. Karena ini kita mau follow up lagi. (Ada penyegehan ke depan?) Pokoknya tenang aja, kita pasti (penegakkan hukum). Saya cuma bisa bilang gini, Pak Menteri kalau urusan ekologi, urusan penegakan hukum, terutama tentang pemanfaatan ruang laut yang tidak berizin, sudah banyak yang beliau lakukan penyegehan laut oleh PSDKP. Di resort Batam, terus kapal pasir. Jadi kalau urusan kayak gini, tetap harus hati-hati. Karena nggak bisa gebyah uyah, kadang-kadang yang kita hadapin perusahaan, kadang-kadang warga yang nggak paham," imbuh Doni.	
STRUKTUR TEMATIK		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Detail	1. Doni mengatakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menyurati pemilik pagar laut di Bekasi lantaran tidak mengantongi izin KKPRIL dari KKP. Surat tersebut telah dilayangkan sejak 19 Desember 2024 lalu. 2. Doni pun menerangkan sampai saat ini pihaknya belum menerima surat balasan dari pemilik pagar laut di Bekasi. Ke depan, KKP akan tetap menegakkan hukum apabila tak kunjung mendapat balasan. Salah satu upaya penegakkannya dengan penyegehan.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi <i>detail</i>. Hal tersebut dikarenakan lebih menjelaskan tindak lanjut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai pagar laut di Bekasi yang tidak memiliki izin dan akan melakukan proses lebih lanjut jika KKP tidak mendapatkan tanggapan dari pemilik pagar laut di Bekasi.
Koherensi	1. Jadi sekarang memang lagi ada proses penegakan hukum karena ada indikasi pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin KKPRIL. 2. Dia belum mau membeberkan nama pemiliknya karena masih dalam proses investigasi. 3. Ke depan, KKP akan tetap menegakkan hukum apabila tak kunjung mendapat balasan.	Koherensi sebab-akibat: karena, apabila. Koherensi sebab-akibat menunjukkan tindakan pemerintah yang memiliki dasar yang jelas.

Bentuk Kalimat	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan pagar yang membentang di perairan Bekasi tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). 2. Kita itu tanggal 19 Desember sudah kirим surat (dari) PSDKP. 3. Doni menjelaskan pemilik pagar laut di Bekasi berbeda dengan pemilik pagar laut di Tangerang. 4. Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto. 5. Surat tersebut telah dilayangkan sejak 19 Desember 2024 lalu.	Kalimat aktif: mengungkapkan, kirim, menjelaskan Kalimat pasif: disampaikan, dilayangkan. Kalimat aktif dan pasif tersebut lebih menekankan pada tindakan KKP dalam menangani kasus ini.
Kata Ganti	Kita itu tanggal 19 Desember sudah kirim surat (dari) PSDKP. Pemiliknya kita tahu ini beda nih (dengan yang di Tangerang). Jadi pemiliknya kita tahu, tapi saya nggak bisa sebut siapa pemiliknya. Meski begitu, dia belum mau membeberkan nama pemiliknya karena masih dalam proses investigasi. Saya cuma bisa bilang gini, Pak Menteri kalau urusan ekologi, urusan penegakan hukum, terutama tentang pemanfaatan ruang laut yang tidak berizin, sudah banyak yang beliau lakukan penyevelan laut oleh PSDKP.	1. Kata ganti orang pertama: kita, saya. Kata “kita” merujuk pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Kata “saya” merujuk pada Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto. 2. Kata ganti orang ketiga: dia, beliau. Kata “dia” merujuk pada Doni. Kata “beliau” merujuk pada Pak Menteri. 3. Kata ganti kepemilikan: -nya. Kata “-nya” merujuk pada kepemilikan, seperti pemilik pagar laut.
STRUKTUR RETORIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Kata/idiom	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan pagar yang membentang di perairan	1. Gebyah uyah: menyamaratakan. 2. Pelanggaran: melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, norma, atau aturan.

	Bekasi tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). - Doni mengatakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menyurati pemilik pagar laut di Bekasi lantaran tidak mengantongi izin KKPRL dari KKP. "Kita itu tanggal 19 Desember sudah kirim surat (dari) PSDKP. Jadi sekarang memang lagi ada proses penegakan hukum karena ada indikasi pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin KKPRL," kata Doni saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025). - Meski begitu, dia belum mau membeberkan nama pemiliknya karena masih dalam proses investigasi. "Pemiliknya kita tahu ini beda nih (dengan yang di Tangerang). Jadi pemiliknya kita tahu, tapi saya nggak bisa sebut siapa pemiliknya. Kalau kita sih sudah berkirim surat, sudah memberikan permintaan untuk penghentian kegiatannya," imbuh Doni. - Salah satu upaya penegakkannya dengan penyegelan. "Ya belum. Karena ini kita mau follow up lagi. (Ada penyegelan ke depan?) Pokoknya tenang aja, kita pasti (penegakkan hukum). Saya cuma bisa bilang gini, Pak Menteri kalau urusan ekologi, urusan penegakan hukum, terutama tentang pemanfaatan ruang laut yang tidak berizin, sudah banyak yang beliau lakukan penyegelan laut oleh PSDKP. Di resort Batam, terus kapal pasir. Jadi kalau urusan kayak gini, tetap harus hati-hati. Karena nggak bisa gebyah uyah, kadang-kadang yang kita hadapin perusahaan, kadang-kadang warga yang nggak paham," imbuh Doni.	- Penyegelan: menyegel suatu hal. <i>Follow up</i>: melakukan tindak lanjut, mengambil langkah selanjutnya. - Investigasi: melakukan penyelidikan untuk menemukan data, fakta, atau jawaban mengenai hal yang diselidiki. - Menyurati: mengirim surat, mengabari secara tertulis, melayangkan surat. - Penegakan hukum: hukum, penindakan, penerapan hukum. - Pemberhentian: menghentikan, penutupan, pemberhentian. - Tidak mengantongi izin: tidak memiliki, tidak mempunyai, tidak memperoleh izin. Kata dan frasa dari kutipan di atas menunjukkan kasus ini sebagai bentuk pelanggaran, serta menempatkan pemerintah sebagai pihak yang tegas dan bertanggung jawab dalam menangani kasus ini.
--	--	--

Gambar		Gambar tersebut adalah ilustrasi pagar laut di Bekasi.
--------	---	--



Judul Berita: Pagar Misterius juga Ditemukan di Laut Bekasi, KKP Siap Segel Jurnalis: Antara News		
STRUKTUR SINTAKSIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>Headline</i>	Pagar Misterius juga Ditemukan di Laut Bekasi, KKP Siap Segel	Dari judul berita tersebut menunjukkan dua hal yang menjadi topik utama, yaitu pagar misterius di laut Bekasi dan KKP. Kata “misterius” menunjukkan bahwa pagar tersebut tidak jelas asal usulnya. Kemudian, “KKP Siap Segel” menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah dalam merespons tindak tersebut.
<i>Lead</i>	Pagar yang dibangun di atas permukaan laut juga ditemukan di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap menyegel pagar di perairan Bekasi, Jawa Barat bila tidak memiliki izin dasar berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).	<i>Lead</i> tersebut masih berkaitan dengan <i>headline</i> . <i>Lead</i> dalam berita ini berfokus pada unsur <i>what</i> dan <i>who</i> yang menunjukkan tindakan yang diambil oleh KKP dalam menangani kasus pagar laut yang tidak berizin.
Latar Informasi	1. Sebelumnya, marak pemberitaan adanya pemagaran di laut berbahan bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2. Sebelumnya, pagar laut ditemukan di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut memiliki panjang sekitar 30,16 kilometer (km).	Kata “sebelumnya” menunjukkan penanda bahwa terdapat informasi tambahan yang masih berkaitan dengan peristiwa dalam berita ini. Latar informasi tersebut menunjukkan bahwa berita mengenai kasus pagar laut sebelum 2025 juga pernah diberitakan dan sudah menjadi perhatian publik sebelumnya.
Kutipan Sumber	1. "Jika tidak ada izin PKKPRL, (pagar di laut) tetap disegel," ujar Pung Nugroho Saksono dilansir Antara, Selasa (14/1/2025). 2. "Panjang 30,16 km ini meliputi enam kecamatan, tiga desa di Kecamatan Kronjo, kemudian tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, dan tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga," kata	Dalam berita ini terdapat dua narasumber, yakni Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti. Terdapat 6 kutipan sumber yang berupa 2 kutipan langsung dan 4 kutipan tidak langsung dari narasumber. Kutipan sumber tersebut cenderung berasal dari sudut pandang

	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti dalam diskusi publik di gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (7/1). 3. Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksiono menegaskan pihaknya siap melakukan penyegelan terhadap pagar di laut jika tidak memiliki PKKPRL. 4. Ipunk, sapaan akrab Pung, mengatakan pihaknya segera meninjau ke lapangan. KKP akan mengecek pemagaran di wilayah perairan Bekasi itu. 5. Namun KKP menegaskan siap melakukan penyegelan bila pagar tersebut tidak memiliki PKKPRL. 6. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menyampaikan pemagaran laut di pesisir Kabupaten Tangerang membentang sepanjang 30,16 km. Pemasangan pagar laut tersebut mencakup enam wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang.	pemerintah yang mendukung positif terhadap tindakan pemerintah.
Pernyataan	1. Pagar yang dibangun di atas permukaan laut juga ditemukan di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap menyegel pagar di perairan Bekasi, Jawa Barat bila tidak memiliki izin dasar berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL). 2. Meski begitu, ia belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai adanya pemagaran di perairan Bekasi tersebut. 3. Sebelumnya, marak pemberitaan adanya pemagaran di laut berbahan bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 4. Di pagar laut tersebut tampak ribuan batang bambu yang terpancang secara rapi di wilayah perairan. Terlihat dua deretan bambu yang menopang gundukan tanah di atas susunan pagar bambu.	Terdapat 7 pernyataan wartawan yang menonjolkan tindakan serius dan tegas pemerintah dalam menanggapi kasus ini. Pernyataan wartawan juga terdapat pada bagian <i>lead</i> dan latar informasi. Wartawan juga menggambarkan bentuk atau ciri-ciri dari pagar laut yang menunjukkan bahwa pagar laut dibuat secara sengaja. Dengan demikian, hal tersebut mengarahkan pembaca untuk memiliki bayangan kondisi di sana. Selain itu, pagar laut yang disampaikan wartawan belum mendapatkan keterangan dari pihak berwajib. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik pagar laut belum memberikan kejelasan terkait pembangunan dan kegiatan mereka.

	5. Jejeran bambu tersebut membentuk garis panjang menyerupai tanggul, dengan hamparan perairan di tengahnya yang mirip sungai. 6. Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak yang berwenang terkait hal tersebut. 7. Sebelumnya, pagar laut ditemukan di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut memiliki panjang sekitar 30,16 kilometer (km).	
Penutup	"Panjang 30,16 km ini meliputi enam kecamatan, tiga desa di Kecamatan Kronjo, kemudian tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, dan tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti dalam diskusi publik di gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (7/1).	Penutup dalam berita ini adalah kalimat langsung dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengenai kasus pagar laut yang terjadi di daerah lain, selain di Bekasi. enutup berita ini menunjukkan lebih valid dan meyakinkan dikarenakan berupa kutipan sumber dari pemerintah.
STRUKTUR SKRIP		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>What</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap menyegel pagar di perairan Bekasi, Jawa Barat bila tidak memiliki izin dasar berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).	Apakah yang dibahas dalam berita tersebut?
<i>When</i>	"Jika tidak ada izin PKKPRL, (pagar di laut) tetap disegel," ujar Pung Nugroho Saksono dilansir Antara, Selasa (14/1/2025).	Kapan Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono, menyampaikan akan tetap menyegel jika pagar laut di Bekasi tidak memiliki izin?
<i>Where</i>	Pagar yang dibangun di atas permukaan laut juga ditemukan di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar).	Di mana terjadinya pemagaran laut?
<i>Who</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap menyegel pagar di perairan Bekasi, Jawa Barat bila tidak memiliki izin dasar berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).	Siapakah siap menyegel pagar di perairan Bekasi, Jawa Barat bila tidak memiliki izin dasar berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL)?

<i>Why</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap menyegel pagar di perairan Bekasi, Jawa Barat bila tidak memiliki izin dasar berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).	Kenapa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan pagar laut di Bekasi?
<i>How</i>	1. Di pagar laut tersebut tampak ribuan batang bambu yang terpancang secara rapi di wilayah perairan. Terlihat dua deretan bambu yang menopang gundukan tanah di atas susunan pagar bambu. 2. Jejeran bambu tersebut membentuk garis panjang menyerupai tanggul, dengan hamparan perairan di tengahnya yang mirip sungai.	Bagaimanakah bentuk dari pagar laut di perairan Bekasi?
STRUKTUR TEMATIK		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Detail	1. Sebelumnya, marak pemberitaan adanya pemagaran di laut berbahan bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2. Di pagar laut tersebut tampak ribuan batang bambu yang terpancang secara rapi di wilayah perairan. Terlihat dua deretan bambu yang menopang gundukan tanah di atas susunan pagar bambu. 3. Jejeran bambu tersebut membentuk garis panjang menyerupai tanggul, dengan hamparan perairan di tengahnya yang mirip sungai.	Hal tersebut dikarenakan menjelaskan penemuan pagar laut di Bekasi dan menyertakan ciri-ciri pagar laut secara rinci.
Koherensi	1. Sebelumnya, marak pemberitaan adanya pemagaran di laut berbahan bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap menyegel pagar di perairan Bekasi, Jawa Barat bila tidak memiliki izin dasar berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).	Koherensi kronologis: sebelumnya. Koherensi sebab-akibat: bila. Penggunaan koherensi kronologis memberikan informasi tambahan kepada pembaca mengenai kasus ini juga pernah terjadi sebelumnya. Koherensi sebab-akibat berikut memberikan kesan logis dan mendukung tindakan KKP.

Bentuk Kalimat	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap menyegel pagar di perairan Bekasi, Jawa Barat bila tidak memiliki izin dasar berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL). 2. Pihaknya siap melakukan penyegelan terhadap pagar di laut jika tidak memiliki PKKPRL. 3. Jika tidak ada izin PKKPRL, (pagar di laut) tetap disegel.	Kalimat aktif: menyegel, penyegelan. Kalimat pasif: disegel. Kalimat aktif dan pasif tersebut menonjolkan KKP sebagai aktor yang menindak dengan tegas dan serius kasus ini.
Kata Ganti	1. Meski begitu, ia belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai adanya pemagaran di perairan Bekasi tersebut. 2. Pihaknya segera meninjau ke lapangan. KKP akan mengecek pemagaran di wilayah perairan Bekasi itu. 3. Pihaknya siap melakukan penyegelan terhadap pagar di laut jika tidak memiliki PKKPRL.	1. Kata ganti orang ketiga tunggal: ia. Kata “ia” merujuk pada Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono. 2. Kata ganti kepemilikan: -nya. Kata “-nya” merujuk pada KKP.
STRUKTUR RETORIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Kata/idiom	1. Pagar Misterius juga Ditemukan di Laut Bekasi, KKP Siap Segel. 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap menyegel pagar di perairan Bekasi, Jawa Barat bila tidak memiliki izin dasar berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL). 3. Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono menegaskan pihaknya siap melakukan penyegelan terhadap pagar di laut jika tidak memiliki PKKPRL. 4. "Jika tidak ada izin PKKPRL, (pagar di laut) tetap disegel," ujar Pung Nugroho Saksono dilansir Antara, Selasa (14/1/2025). 5. Namun KKP menegaskan siap melakukan penyegelan bila pagar tersebut tidak memiliki PKKPRL.	1. Segel/penyegel: disita, ditutup, diberi tanda. 2. Misterius: sulit diketahui, tidak jelas, suatu hal yang janggal. 3. Marak: banyak, sering, ramai. 4. Tidak memiliki izin: tidak memiliki persetujuan dari pihak berwenang sehingga menunjukkan kegiatan ilegal. 5. Siap: bersedia, tersedia, sedia. Kata <i>segel</i> dan <i>siap</i> dapat membangun kesan positif untuk pemerintah sebagai penegak hukum yang tegas dan responsif. Di sisi lain, kata <i>misterius</i> dan <i>marak</i>, serta frasa <i>tidak mengantngi izin</i>, dapat memberikan kesan negatif kepada pemilik pagar laut.

	6. Sebelumnya, marak pemberitaan adanya pemagaran di laut berbahan bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	
Gambar		Gambar tersebut adalah Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipung). Foto tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah ditampilkan sedang terjun ke lapangan sehingga dapat membangun citra positif bagi pemerintah.



Judul Berita: Benar Saja, Pagar Laut di Bekasi Ternyata buat Reklamasi Jurnalis: Andi Hidayat		
STRUKTUR SINTAKSIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>Headline</i>	Benar Saja, Pagar Laut di Bekasi Ternyata buat Reklamasi	Judul tersebut menunjukkan bahwa pagar laut memang bertujuan untuk reklamasi. Hal itu ditunjukan dari penggunaan kata “benar saja” dan “ternyata” yang memperkuat kesan untuk membenarkan pagar laut untuk reklamasi. Hal ini juga menegaskan adanya fakta atau kebenaran.
<i>Lead</i>	Pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) buka-bukaan soal alasan pemagaran laut yang ditaksir seluas 60 hektar (ha) di wilayah perairan Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	<i>Lead</i> dalam berita ini masih berkaitan dengan <i>headline</i> yang berfokus pada unsur <i>who</i> dan <i>what</i> . Aktor dari <i>lead</i> ini adalah Pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).
Latar Informasi	1. Untuk diketahui, PT TRPN sendiri memasang pagar laut di Bekasi untuk melakukan reklamasi dengan tujuan kegiatan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Penataan meliputi fasilitas pokok seperti pendalaman kolam labuh, pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur. Di samping itu ada juga penataan toko, pembangunan kantor, serta pengaktifan tempat lelang maupun cold storage. 2. Sebelumnya, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan, kegiatan ini dikategorikan reklamasi karena kegiatan dilakukan di luar garis pantai berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.	Latar informasi tersebut memberikan pemahaman tambahan kepada pembaca mengenai tujuan dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT TRPN. Selain itu, pembaca juga dapat mengetahui mengenai kasus ini telah berdasarkan hukum karena berda di luar garis pantai.
Kutipan Sumber	1. "Kami lagi mencoba mengelola yang punya masyarakat ini tadinya, supaya nanti kami dapat kuasa untuk melakukan pengelolaan. Tapi kan ternyata kan, ini clear	Dalam berita ini terdapat tiga narasumber, yaitu Kuasa Hukum PT TRPN (Deolipa Yumara), Direktur Jenderal PSDKP (Pung Nugroho Saksiono (Ipunk)), Direktur

	ditutup. Mau nggak mau kami akan tetap bekerja di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan. Harapan kami nanti ini pelabuhan jadi besar," kata Deolipa kepada wartawan di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/2/2025). 2. "Jadi ini tetap laut dan kami akan berusaha, karena di bidang perikanan, tentu kami akan mencoba membuat pelabuhan besar di sini kerja sama tentunya dengan pemerintah Jawa Barat," tambahnya. 3. "Setelah ini nanti kami bongkar, kami rapihkan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku termasuk semua perizinan akan kami upayakan baik di tingkat pusat maupun gubernur," jelasnya. 4. "Dari beberapa waktu lalu, mengenai masalah perizinan ada kelirunya. Tapi kan semua orang bisa keliru kan. Jadi kita minta maaf terhadap hal ini dan sudah terjadi ini kan, jadi kita minta maaf. Tapi kita mencoba untuk memperbaiki, semoga kemudian jadi harapannya menjadi baik kemudian bisa kemudian kami tidak terlalu dipersalahkan," tutupnya. 5. "Jadi memang kami diskusi dengan Abang, lawyer (Deolipa), menyampaikan, 'Bang, karena Abang yang memasang, sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran'. Setuju beliau karena itu tadi, beliau sadar hukum bahwa ini keliru," kata Ipunk. 6. "Dari hasil penyidikan, kegiatan reklamasi ini terindikasi melanggar Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja," kata Sumono dalam keterangannya, Rabu (15/1).	Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Sumono Darwinto). Penempatan kutipan sumber tersebut memiliki kecenderungan yang lebih dominan pada pihak PT TRPN. Terdapat 11 kutipan sumber yang berupa 6 kutipan langsung dan 5 kutipan tidak langsung.
--	---	--

	7. Kuasa Hukum PT TRPN, Deolipa Yumara mengatakan, pihaknya hendak melakukan reklamasi untuk mengelola pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya. Pengelolaan PT TRPN dilakukan melalui Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga sekitar. 8. Hari ini, kata Deolipa, PT TRPN melakukan pembongkaran pagar laut dan tanah yang kadung direklamasi dengan estimasi pengerjaan paling lambat 10 hari. Namun begitu, ia mengaku PT TRPN akan tetap mengelola PPI Paljaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Ia menambahkan, pembongkaran akan dilakukan secara mandiri dengan pendampingan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 10. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan, pembongkaran mandiri yang dilakukan PT TRPN menjadi bagian dari sanksi administrasi. 11. Sebelumnya, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan, kegiatan ini dikategorikan reklamasi karena kegiatan dilakukan di luar garis pantai berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.	
Pernyataan	1. Pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) buka-bukaan soal alasan pemagaran laut yang ditaksir seluas 60 hektar (ha) di wilayah perairan Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2. Untuk diketahui, PT TRPN sendiri memasang pagar laut di Bekasi untuk melakukan reklamasi dengan tujuan	Terdapat 3 pernyataan dalam berita ini. Pernyataan tersebut bergabung dengan unsur <i>lead</i> dan latar informasi. terdapat pernyataan yang menunjukkan bahwa sebelumnya ada sesuatu yang belum disampaikan kepada publik. Frasa “buka-bukaan” memberikan kesan pihak perusahaan mengungkapkan hal yang sebelumnya belum disampaikan kepada publik,

	kegiatan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Penataan meliputi fasilitas pokok seperti pendalaman kolam labuh, pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur. Di samping itu ada juga penataan toko, pembangunan kantor, serta pengaktifan tempat lelang maupun cold storage. 3. PT TRPN dikabarkan menyewa lahan yang ada di kawasan PPI Paljaya seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun dengan kompensasi sebesar Rp 2,6 miliar dan ditambah beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan.	seperti perusahaan yang menyewa lahan di PPI Paljaya. Dengan demikian, wartawan menekankan bahwa pihak perusahaan telah mengungkapkan alasannya memasang pagar laut secara transparan.
Penutup	"Dari hasil penyidikan, kegiatan reklamasi ini terindikasi melanggar Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja," kata Sumono dalam keterangannya, Rabu (15/1).	Penutup dari berita ini adalah kalimat langsung dari Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, mengenai pagar laut ini melanggar undang-undang tentang cipta kerja. Penempatan kutipan sumber dari Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Sumono Darwinto) cenderung memberikan sudut pandang bahwa kasus ini bermasalah dengan hukum.
STRUKTUR SKRIP		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>What</i>	Kuasa Hukum PT TRPN, Deolipa Yumara mengatakan, pihaknya hendak melakukan reklamasi untuk mengelola pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya.	Apakah yang terjadi dalam berita tersebut?
<i>When</i>	"Kami lagi mencoba mengelola yang punya masyarakat ini tadinya, supaya nanti kami dapat kuasa untuk melakukan pengelolaan. Tapi kan ternyata kan, ini clear ditutup. Mau nggak mau kami akan tetap bekerja di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan. Harapan kami nanti ini pelabuhan jadi besar," kata Deolipa kepada wartawan di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/2/2025) .	Kapan pihak PT TRPN menyampaikan pihaknya berencana mengelola milik masyarakat dan akan tetap melakukan pengelolaan pelabuhan?
<i>Where</i>	Kuasa Hukum PT TRPN, Deolipa Yumara mengatakan, pihaknya hendak melakukan reklamasi untuk mengelola pelabuhan di	Di manakah pihak PT TRPN hendak melakukan reklamasi untuk mengelola pelabuhan?

	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya. Pengelolaan PT TRPN dilakukan melalui Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga sekitar.	
<i>Who</i>	Untuk diketahui, PT TRPN sendiri memasang pagar laut di Bekasi untuk melakukan reklamasi dengan tujuan kegiatan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya.	Siapakah yang hendak melakukan reklamasi untuk mengelola pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya?
<i>Why</i>	Untuk melakukan reklamasi dengan tujuan kegiatan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Penataan meliputi fasilitas pokok seperti pendalaman kolam labuh, pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur. Di samping itu ada juga penataan toko, pembangunan kantor, serta pengaktifan tempat lelang maupun <i>cold storage</i> .	Mengapa PT TRPN memasang pagar laut di Bekasi?
<i>How</i>	Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksiono (Ipunk) mengatakan, pembongkaran mandiri yang dilakukan PT TRPN menjadi bagian dari sanksi administrasi.	Bagaimanakah cara pemerintah menindak lanjuti pembangunan pagar laut yang tidak berizin?
STRUKTUR TEMATIK		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Detail	1. Untuk diketahui, PT TRPN sendiri memasang pagar laut di Bekasi untuk melakukan reklamasi dengan tujuan kegiatan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Penataan meliputi fasilitas pokok seperti pendalaman kolam labuh, pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur. Di samping itu ada juga penataan toko, pembangunan kantor, serta pengaktifan tempat lelang maupun <i>cold storage</i>. 2. Hari ini, kata Deolipa, PT TRPN melakukan pembongkaran pagar laut dan tanah yang kadung direklamasi dengan estimasi pengerjaan paling lambat 10 hari. Namun begitu, ia mengaku PT TRPN akan tetap	Hal tersebut dikarenakan pihak PT TRPN menjelaskan mengenai pengelolaan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga sekitar, serta tujuan dari pemasangan pagar laut di Bekasi. Kemudian, akan dilakukan pembongkaran pagar laut yang tidak memiliki izin atau melanggar peraturan daerah.

	mengelola PPI Paljaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. PT TRPN dikabarkan menyewa lahan yang ada di kawasan PPI Paljaya seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun dengan kompensasi sebesar Rp 2,6 miliar dan ditambah beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan.	
Koherensi	Kegiatan ini dikategorikan reklamasi karena kegiatan dilakukan di luar garis pantai	Koherensi sebab-akibat: karena. Koherensi sebab-akibat berikut dapat mendukung pemerintah dikarenakan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan PT TRPN memang adanya pelanggaran.
Bentuk Kalimat	1. Kami lagi mencoba mengelola yang punya masyarakat ini tadinya. 2. PT TRPN melakukan pembongkaran pagar laut dan tanah yang kadung direklamasi dengan estimasi pengerjaan paling lambat 10 hari. 3. Mengaku PT TRPN akan tetap mengelola PPI Paljaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. PT TRPN sendiri memasang pagar laut di Bekasi untuk melakukan reklamasi dengan tujuan kegiatan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. 5. PT TRPN dikabarkan menyewa lahan yang ada di kawasan PPI Paljaya.	Kalimat aktif: mengelola, pembongkaran, memasang, menyewa. Kalimat aktif tersebut menunjukkan kesan positif terhadap PT TRPN. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan terkesan bermanfaat untuk masyarakat disekitar.
Kata Ganti	1. Pihaknya hendak melakukan reklamasi untuk mengelola pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya. 2. Kami lagi mencoba mengelola yang punya masyarakat ini tadinya, supaya nanti kami dapat kuasa untuk melakukan pengelolaan. 3. Harapan kami nanti ini pelabuhan jadi besar,	1. Kata ganti orang pertama jamak: kami, kita. Kata “ kami, kita” merujuk pada PT TRPN. 2. Kata ganti orang ketiga tunggal: ia, beliau. Kata “ia, beliau” merujuk pada Kuasa Hukum PT TRPN, Deolipa Yumara. 3. Kata ganti petunjuk: ini.

	4. Jadi kita minta maaf terhadap hal ini dan sudah terjadi ini kan, jadi kita minta maaf. Tapi kita mencoba untuk memperbaiki, semoga kemudian jadi harapannya menjadi baik kemudian bisa kemudian kami tidak terlalu dipersalahkan. 5. Namun begitu, ia mengaku PT TRPN akan tetap mengelola PPI Paljaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Setuju beliau karena itu tadi, beliau sadar hukum bahwa ini keliru. 7. Jadi kita minta maaf terhadap hal ini dan sudah terjadi ini kan. 8. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan, kegiatan ini dikategorikan reklamasi.	Kata “ini” merujuk pada pemasangan pagar di laut Bekasi. 4. Kata ganti kepemilikan: -nya. Kata “-nya” merujuk pada PT TRPN.
STRUKTUR RETORIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Kata/idiom	1. Benar Saja, Pagar Laut di Bekasi Ternyata buat Reklamasi. 2. Kuasa Hukum PT TRPN, Deolipa Yumara mengatakan, pihaknya hendak melakukan reklamasi untuk mengelola pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya. 3. Hari ini, kata Deolipa, PT TRPN melakukan pembongkaran pagar laut dan tanah yang kadung direklamasi dengan estimasi pengerjaan paling lambat 10 hari. 4. Ia menambahkan, pembongkaran akan dilakukan secara mandiri dengan pendampingan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 5. "Dari beberapa waktu lalu, mengenai masalah perizinan ada kelirunya. Tapi kan semua orang bisa keliru kan.	1. Reklamasi: pemanfaatan daerah tertentu untuk suatu tujuan, pengurukan tanah, atau perairan. 2. Sanksi: hukuman, tanggungan, pembebanan, 3. Kadung: telanjur. 4. Pembongkaran: penghancuran, perombakan, merobohkan. 5. Keliru: tidak tepat, salah, kelalaian. 6. Melanggar: melewati, menyalahi, mengabaikan. 7. Memperbaiki: membenahi, memulihkan, menyesuaikan, merevisi. 8. Buka-bukaan: berterus terang, Kata/idiom tersebut ada yang menunjukkan kesan negatif terhadap pemilik pagar laut karena kegiatan yang

	Jadi kita minta maaf terhadap hal ini dan sudah terjadi ini kan, jadi kita minta maaf. Tapi kita mencoba untuk memperbaiki, semoga kemudian jadi harapannya menjadi baik kemudian bisa kemudian kami tidak terlalu dipersalahkan," tutupnya. 6. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan, pembongkaran mandiri yang dilakukan PT TRPN menjadi bagian dari sanksi administrasi. 7. "Jadi memang kami diskusi dengan Abang, lawyer (Deolipa), menyampaikan, 'Bang, karena Abang yang memasang, sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran'. Setuju beliau karena itu tadi, beliau sadar hukum bahwa ini keliru," kata Ipunk. 8. Untuk diketahui, PT TRPN sendiri memasang pagar laut di Bekasi untuk melakukan reklamasi dengan tujuan kegiatan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. 9. Sebelumnya, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan, kegiatan ini dikategorikan reklamasi karena kegiatan dilakukan di luar garis pantai berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042. 10. "Dari hasil penyidikan, kegiatan reklamasi ini terindikasi melanggar Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja," kata Sumono dalam keterangannya, Rabu (15/1). 11. Pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) buka-bukaan soal alasan pemagaran laut yang ditaksir seluas 60 hektar (ha) di wilayah perairan Desa	dilakukan oleh pemilik pagar laut di Bekasi tidak memiliki izin. Tetapi, ada kata yang memberikan kesan bahwa pemilik pagar laut memiliki rasa bertanggung jawab dan adanya niat baik untuk membenahi tindakan mereka.
--	--	---

	Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	
Gambar		Gambar tersebut adalah gambar pagar laut di Bekasi yang dibuat oleh pihak PT TRPN. Dengan adanya gambar pagar laut tersebut dapat menegaskan bahwa pagar laut memang sengaja dibuat.



Judul Berita: Nusron Wahid Bakal Pecat Pegawai BPN Terlibat Kasus Pagar Laut di Bekasi Jurnalis: Antara News		
STRUKTUR SINTAKSIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>Headline</i>	Nusron Wahid Bakal Pecat Pegawai BPN Terlibat Kasus Pagar Laut di Bekasi	Judul tersebut menunjukkan aktor, yaitu Nusron Wahid yang menindak tegas pegawai BPN yang terlibat kasus pagar laut. Judul tersebut juga menunjukkan tindakan responsif dari Nusron Wahid mengenai kasus ini, sehingga menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menangani kasus ini.
<i>Lead</i>	Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut investigasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat, sudah selesai. Dia akan memecat pegawai BPN yang terlibat kasus tersebut.	Berita ini memuat unsur <i>lead</i> yang berfokus pada unsur <i>who</i> . Unsur <i>lead</i> masih berkaitan dengan judul berita yang menekankan Nusron Wahid sebagai aktor yang bertindak tegas dan disiplin dalam menangani kasus ini.
Latar Informasi	-	Dalam berita ini tidak memuat latar informasi.
Kutipan Sumber	1. "Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan, ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi," kata Nusron saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir Antara, Selasa (18/2/2025). 2. "Yang memegang akun itu memang kalau nggak Kepala Kantor, Kepala Seksi. Nah ternyata karena ini program PTSL, saya baru dapat informasi, kalau program PTSL itu tim adjudikasi pun, tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten itu juga boleh mendapatkan akun," ucap Nusron. 3. Hal itu diungkap Nusron usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2). Nusron melaporkan perkembangan terkini terkait	Dalam berita ini hanya memuat satu narasumber, yaitu Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Terdapat 6 kutipan sumber yang berupa 2 kutipan langsung dan 4 kutipan tidak langsung. Kutipan sumber tersebut menonjolkan Menteri Nusron sebagai aktor yang menangani kasus ini dengan serius dan tegas.

	pertanahan, termasuk penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah Bekasi dan Tangerang dalam kasus pagar laut. 4. Nusron menjelaskan bahwa modus operandi dalam kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut dilakukan oleh oknum pejabat di tingkat bawah. Kasus itu berawal dari adanya nomor induk bidang pada 89 sertifikat yang dimiliki oleh 84 orang dengan luas mencapai 11,6 hektare. 5. Nusron menegaskan bahwa pejabat BPN yang diduga melakukan penyalahgunaan jabatan dalam kasus pagar laut bukan berasal dari eselon 1 dan eselon 2. 6. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Nusron juga membahas mengenai tumpang tindih kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) yang sering terjadi akibat kesalahan administrasi pertanahan di masa lalu. 7. Menurut Nusron, banyak sertifikat yang terbit pada periode 1960-1987 tidak memiliki peta bidang tanah yang jelas, sehingga menimbulkan permasalahan kepemilikan di kemudian hari.	
Pernyataan	1. Nusron juga baru mengetahui bahwa 89 sertifikat itu didaftarkan melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Akun PTSL ini dapat dikelola oleh tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten, sehingga memberikan ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang. 2. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Nusron juga membahas mengenai tumpang tindih kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) yang sering terjadi akibat kesalahan administrasi pertanahan di masa lalu.	Terdapat 2 pernyataan dari wartawan yang didukung dengan fakta. Data berupa angka menunjukkan perubahan yang tidak wajar dalam administrasi pertanahan. Wartawan menyampaikan bahwa sertifikat tanah didaftarkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kemudian, melalui pengelolaan akun PTSL, diketahui dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Menteri ATR/BPN bertemu Presiden untuk membahas kasus ini. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi permasalahan pemerintahan daerah namun juga menjadi persoalan pemerintah pusat.

Penutup	Menurut Nusron, banyak sertifikat yang terbit pada periode 1960-1987 tidak memiliki peta bidang tanah yang jelas, sehingga menimbulkan permasalahan kepemilikan di kemudian hari.	Penutup dari berita ini adalah pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, mengenai permasalahan sertifikat tanah yang tidak jelas. Media cenderung menunjukkan bahwa pemerintah peduli dan paham untuk menangani kasus ini.
STRUKTUR SKRIP		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>What</i>	Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut investigasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat, sudah selesai. Dia akan memecat pegawai BPN yang terlibat kasuss tersebut.	Apakah yang dibahas dalam berita tersebut?
<i>When</i>	Hal itu diungkap Nusron usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2) . Nusron melaporkan perkembangan terkini terkait pertanahan, termasuk penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah Bekasi dan Tangerang dalam kasus pagar laut.	Kapan Nusron Wahid menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan?
<i>Where</i>	Hal itu diungkap Nusron usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta , Senin (17/2) . Nusron melaporkan perkembangan terkini terkait pertanahan, termasuk penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah Bekasi dan Tangerang dalam kasus pagar laut.	Di manakah Nusron Wahid menemui Presiden Prabowo?
<i>Who</i>	Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut investigasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat, sudah selesai. Dia akan memecat pegawai BPN yang terlibat kasuss tersebut.	Siapakah yang akan memecat pegawai BPN yang terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi?
<i>Why</i>	Modus operandi dalam kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut dilakukan oleh oknum pejabat di tingkat bawah.	Mengapa bisa terjadi penyalahgunaan sertifikat tanah di Bekasi?
<i>How</i>	1. Berawal dari adanya nomor induk bidang pada 89 sertifikat yang dimiliki oleh 84 orang dengan luas mencapai 11,6 hektare.	Bagaimanakah cara penyalahgunaan sertifikat di tanah Bekasi?

	2. Ketika sertifikat itu dipindahkan ke laut, luasnya menjadi 79 hektare. Kemudian, kepemilikan sertifikat itu juga berubah dari 84 pemilik menjadi 11 pemilik, di mana salah satunya adalah oknum kepala desa setempat. 3. 89 sertifikat itu didaftarkan melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Akun PTSL ini dapat dikelola oleh tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten, sehingga memberikan ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang.	
STRUKTUR TEMATIK		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Detail	1. Nusron menjelaskan bahwa modus operandi dalam kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut dilakukan oleh oknum pejabat di tingkat bawah. Kasus itu berawal dari adanya nomor induk bidang pada 89 sertifikat yang dimiliki oleh 84 orang dengan luas mencapai 11,6 hektare. 2. Ketika sertifikat itu dipindahkan ke laut, luasnya menjadi 79 hektare. Kemudian, kepemilikan sertifikat itu juga berubah dari 84 pemilik menjadi 11 pemilik, di mana salah satunya adalah oknum kepala desa setempat.	Berita ini lebih menjelaskan mengenai Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid yang menjelaskan mengenai perkembangan kasus pagar laut di Bekasi dan pemindahan peta bidang tanah ke laut,
Koherensi	1. Akun PTSL ini dapat dikelola oleh tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten, sehingga memberikan ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang. 2. Menurut Nusron, banyak sertifikat yang terbit pada periode 1960-1987 tidak memiliki peta bidang tanah yang jelas, sehingga menimbulkan permasalahan kepemilikan di kemudian hari.	Koherensi sebab-akibat: sehingga. Koherensi tersebut menekankan bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang bisa terjadi dalam kalangan pemerintah, terutama ketika akun PTSL dikelola oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bentuk Kalimat	1. Dia akan memecat pegawai BPN yang terlibat kasus tersebut. 2. Hal itu diungkap Nusron usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2). Nusron melaporkan perkembangan terkini terkait pertanahan, termasuk penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah Bekasi dan Tangerang dalam kasus pagar laut. 3. Nusron menjelaskan bahwa modus operandi dalam kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut dilakukan oleh oknum pejabat di tingkat bawah. 4. Nusron menegaskan bahwa pejabat BPN yang diduga melakukan penyalahgunaan jabatan dalam kasus pagar laut bukan berasal dari eselon 1 dan eselon 2. 5. Nusron juga membahas mengenai tumpang tindih kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) yang sering terjadi akibat kesalahan administrasi pertanahan di masa lalu. 6. Akun PTSL ini dapat dikelola oleh tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten.	1. Kalimat aktif: memecat, melaporkan, menjelaskan, menegaskan, membahas. 2. Kalimat pasif: diungkap, dikelola, dilakukan. Kalimat aktif tersebut lebih menekankan peran Menteri Nusron Wahid yang bertindak secara tegas dan serius untuk menangani kasus ini.
Kata Ganti	1. Dia akan memecat pegawai BPN yang terlibat kasus tersebut. 2. Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan. 3. Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan.	1. Kata ganti orang ketiga tunggal: dia. Kata “dia” merujuk pada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. 2. Kata ganti orang pertama jamak: kita. Kata “kita” merujuk pada BPN. 3. Kata ganti orang pertama: saya Kata “saya” merujuk pada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
STRUKTUR RETORIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Kata/idiom	1. Nusron menjelaskan bahwa modus operandi dalam kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut dilakukan oleh oknum pejabat di tingkat bawah.	1. Modus operandi: cara seseorang atau kelompok yang melakukan kejahatan terhadap suatu hal. 2. Oknum: seseorang atau individu

	- Nusron menegaskan bahwa pejabat BPN yang diduga melakukan penyalahgunaan jabatan dalam kasus pagar laut bukan berasal dari eselon 1 dan eselon 2. - Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. - Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Nusron juga membahas mengenai tumpang tindih kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) yang sering terjadi akibat kesalahan administrasi pertanahan di masa lalu.	- Aparat: badan yang memiliki wewenang untuk mengabdikan kepada masyarakat, badan pelayanan publik, badan pemerintah, pegawai negeri. - Eselon: struktur organisasi, jenjang jabatan dalam suatu organisasi. - Investigasi: tindakan penyelidikan untuk menemukan bukti. - Penyalahgunaan wewenang: melakukan tindakan dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan. - Tumpang tindih: dua atau lebih hal yang saling menutupi dan nantinya menimbulkan kekacauan. Kata di atas menunjukkan media membangun pemberitaan yang berkesan formal dan kasus ini berkaitan dengan struktur pemerintahan.
Gambar		Gambar tersebut adalah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Gambar tersebut memberikan kesan Menteri Nusron Wahid menyampaikan dengan tegas mengenai perkembangan kasus pagar laut.

Judul Berita: Pihak Perusahaan Ngaku Salah Bikin Pagar Laut di Bekasi Jurnalis: Andi Hidayat		
STRUKTUR SINTAKSIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>Headline</i>	Pihak Perusahaan Ngaku Salah Bikin Pagar Laut di Bekasi	Judul tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan kesalahan dari pihak pembuat pagar laut di Bekasi. <i>Headline</i> tersebut menunjukkan pihak perusahaan sebagai aktor yang menyampaikan pengakuan kesalahan dalam pembuat pagar laut di Bekasi.
<i>Lead</i>	Pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui kesalahannya karena memasang pagar laut di perairan Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemasangan pagar laut ini dilakukan untuk kegiatan reklamasi dengan tujuan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya.	<i>Lead</i> tersebut masih berkaitan dengan <i>headline</i> yang berfokus pada unsur <i>who</i> dan <i>what</i> . <i>Lead</i> tersebut menunjukkan pihak PT TRPN yang menjadi aktor untuk menyampaikan bahwa pihaknya yang memasang pagar telah mengakui kesalahannya..
Latar Informasi	Adapun sebelumnya, pagar laut berbahan bambu di Bekasi ini disegel Ditjen PSDKP lantaran mengganggu akses melaut para nelayan sekitar dan ekosistem pesisir.	Frasa “adapun sebelumnya” menunjukkan informasi tambahan untuk pembaca yang berkaitan dengan peristiwa dalam berita ini. Penambahan latar informasi memberikan pemahaman tambahan kepada pembaca bahwa pemasangan pagar laut memberikan dampak negatif.
Kutipan Sumber	1. "Kami salah, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang, dan perizinan," kata Deolipa kepada wartawan di PPI Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Selasa (11/2/2025). 2. "Setelah ini nanti kami bongkar, kami rapihkan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku termasuk semua perizinan akan kami upayakan baik di tingkat pusat maupun gubernur," jelasnya.	Berita ini mencantumkan kalimat langsung dan tidak langsung. Terdapat 8 kutipan sumber yang berupa 3 kutipan langsung dan 5 kutipan tidak langsung. Kutipan sumber dalam berita ini dari narasumber Kuasa Hukum PT TRPN (Deolipa Yumara) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) (Pung Nugroho Saksono (Ipunk)). Kutipan sumber tersebut menunjukkan media memberikan kesempatan kepada

	3. "Hari ini rencana kami menyaksikan dari pihak perusahaan PT TRPN yang akan melakukan pembongkaran. Jadi ini lebih ke inisiatif kesadaran hukum," kata Ipunk. 4. Kuasa Hukum PT TRPN Deolipa Yumara mengatakan, pihaknya melakukan reklamasi melalui pengelolaan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga sekitar. Namun begitu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kegiatan PT TRPN melanggar ketentuan karena tidak memenuhi izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). 5. Deolipa mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan reklamasi setelah pembongkaran yang dilakukan hari ini. Meski begitu, ia menekankan kegiatan reklamasi ke depan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Deolipa menambahkan, PT TRPN menargetkan pembongkaran pagar laut dan reklamasi paling lambat 10 hari yang dibantu dengan alat berat seperti ekskavator. 7. Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan, kegiatan pembongkaran yang dilakukan PT TRPN menjadi bagian dari kesadaran hukum. 8. Ipunk mengatakan, PT TRPN mengakui kesalahannya dalam melakukan kegiatan reklamasi. Ia juga mengimbau pihak pemasang pagar laut untuk segera melakukan pembongkaran jika dinyatakan melanggar.	pihak perusahaan untuk klarifikasi dan mengakui kesalahannya.
Pernyataan	1. Pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui kesalahannya karena memasang pagar laut di perairan Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemasangan pagar laut ini	Terdapat 2 pernyataan wartawan dalam berita ini. Pernyataan tersebut bergabung dengan unsur <i>lead</i> dan latar informasi. Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa adanya pagar laut dapat memberikan

	dilakukan untuk kegiatan reklamasi dengan tujuan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya. 2. Adapun sebelumnya, pagar laut berbahan bambu di Bekasi ini disegel Ditjen PSDKP lantaran mengganggu akses melaut para nelayan sekitar dan ekosistem pesisir.	dampak negatif bagi masyarakat nelayan. Oleh karena itu, tindakan penyevelan dan pembongkaran pagar laut menjadi solusi yang tepat untuk kasus ini. Selain itu, hal ini menunjukkan citra negatif bagi pemilik pagar laut karena telah merugikan masyarakat di pesisir pantai.
Penutup	"Hari ini rencana kami menyaksikan dari pihak perusahaan PT TRPN yang akan melakukan pembongkaran. Jadi ini lebih ke inisiatif kesadaran hukum," kata Ipunk.	Penutup dari berita ini adalah kutipan sumber dari Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) (Pung Nugroho Saksone (Ipunk)), mengenai PT TRPN telah mengakui kesalahannya mengenai kegiatan reklamasi. Penutup tersebut menunjukkan kecenderungan yang menonjolkan pemerintah sebagai aktor yang bertindak secara tegas dan terlibat langsung untuk menangani kasus ini.
STRUKTUR SKRIP		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>What</i>	Pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui kesalahannya karena memasang pagar laut di perairan Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	Apakah yang terjadi dalam berita tersebut?
<i>When</i>	"Kami salah, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang, dan perizinan," kata Deolipa kepada wartawan di PPI Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Selasa (11/2/2025).	Kapan Kuasa Hukum PT TRPN Deolipa Yumara mengatakan, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang, dan perizinan kepada wartawan?
<i>Where</i>	Pemasangan pagar laut ini dilakukan untuk kegiatan reklamasi dengan tujuan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya.	Di manakah pemasangan pagar laut dilakukan untuk kegiatan reklamasi?
<i>Who</i>	Deolipa Yumara.	Siapakah nama kuasa hukum PT TRPN?

<i>Why</i>	Pemasangan pagar laut ini dilakukan untuk kegiatan reklamasi dengan tujuan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya.	Mengapa PT TRPN memasang pagar laut?
<i>How</i>	1. Deolipa mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan reklamasi setelah pembongkaran yang dilakukan hari ini. Meski begitu, ia menekankan kegiatan reklamasi ke depan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. "Setelah ini nanti kami bongkar, kami rapihkan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku termasuk semua perizinan akan kami upayakan baik di tingkat pusat maupun gubernur," jelasnya. 3. PT TRPN menargetkan pembongkaran pagar laut dan reklamasi paling lambat 10 hari yang dibantu dengan alat berat seperti ekskavator. Adapun penertiban kawasan pesisir yang dilakukan PT TRPN sepanjang 3,3 km yang ditaksir seluas 60 hektar.	Bagaimana tanggapan PT TRPN setelah mengetahui melanggar ketentuan karena tidak memenuhi izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)?
STRUKTUR TEMATIK		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Detail	Deolipa menambahkan, PT TRPN menargetkan pembongkaran pagar laut dan reklamasi paling lambat 10 hari yang dibantu dengan alat berat seperti ekskavator. Adapun penertiban kawasan pesisir yang dilakukan PT TRPN sepanjang 3,3 km yang ditaksir seluas 60 hektar.	Hal tersebut dikarenakan menjelaskan bahwa pihak PT TRPN mengakui kesalahannya dan pagar laut memang bertujuan untuk reklamasi. PT TRPN tetap melakukan reklamasi setelah pembongkaran pagar laut dan kedepannya akan sesuai dengan undang-undang.
Koherensi	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kegiatan PT TRPN melanggar ketentuan karena tidak memenuhi izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).	Koherensi sebab-akibat: karena. Koherensi sebab-akibat tersebut menonjolkan KKP sebagai aktor yang telah melakukan penyelidikan dan memiliki bukti

Bentuk Kalimat	1. Pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui kesalahannya karena memasang pagar laut di perairan Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2. Deolipa menambahkan, PT TRPN menargetkan pembongkaran pagar laut dan reklamasi paling lambat 10 hari yang dibantu dengan alat berat seperti ekskavator. Adapun penertiban kawasan pesisir yang dilakukan PT TRPN sepanjang 3,3 km yang ditaksir seluas 60 hektar. 3. Adapun sebelumnya, pagar laut berbahan bambu di Bekasi ini disegel Ditjen PSDKP lantaran mengganggu akses melaut para nelayan sekitar dan ekosistem pesisir. 4. Ipunk mengatakan, PT TRPN mengakui kesalahannya dalam melakukan kegiatan reklamasi. Ia juga mengimbau pihak pemasang pagar laut untuk segera melakukan pembongkaran jika dinyatakan melanggar.	1. Kalimat aktif: mengakui, pembongkaran, mengatakan, mengakui, mengimbau. 2. Kalimat pasif: dilakukan, disegel. Kalimat aktif tersebut lebih mengarah pada pihak TRPN yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan. Sementara itu, kalimat pasif lebih mengarah pada tindakan pemerintah yang dilakukan, seperti penertiban dan penyegelan pagar laut.
Kata Ganti	1. Kuasa Hukum PT TRPN Deolipa Yumara mengatakan, pihaknya melakukan reklamasi melalui pengelolaan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga sekitar. 2. Kami salah, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang, dan perizinan 3. Deolipa mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan reklamasi setelah pembongkaran yang dilakukan hari ini. Meski begitu, ia menekankan kegiatan reklamasi ke depan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Ipunk mengatakan, PT TRPN mengakui kesalahannya dalam melakukan kegiatan reklamasi. Ia juga mengimbau pihak pemasang pagar laut untuk segera melakukan pembongkaran jika dinyatakan melanggar.	1. Kata ganti orang ketiga tunggal: ia. Kata “ia” tersebut merujuk pada Deolipa, Kuasa Hukum PT TRPN. Selain itu, Kata “ia” tersebut merujuk pada Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) (Pung Nugroho Saksono (Ipunk)). 2. Kata ganti orang pertama jamak: kami. Kata “kami” merujuk pada PT TRPN. 3. Kata ganti kepemilikan: -nya. Kata “-nya” merujuk pada PT TRPN.
STRUKTUR RETORIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi

Kata/idiom	1. Pihak Perusahaan Ngaku Salah Bikin Pagar Laut di Bekasi 2. Kegiatan pembongkaran yang dilakukan PT TRPN menjadi bagian dari kesadaran hukum.	1. Kata “Ngaku Salah” dalam judul berita ini adalah bentuk kata tidak formal yang berarti mengakui kesalahan atau telah mengakui pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa perusahaan tidak menyangkal tindakan yang telah mereka lakukan. 2. Kata “kesadaran” menunjukkan bahwa perusahaan yang membangun pagar laut telah paham untuk mematuhi aturan yang berlaku setelah adanya pelanggaran yang mereka lakukan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk mengikuti peraturan yang berlaku, sehingga timbul adanya niat perbaikan dari perusahaan.
Gambar		Gambar tersebut adalah Kuasa Hukum PT TRPN Deolipa Yumara. Gambar tersebut menunjukkan Deolipa Yumara sebagai pihak perusahaan dalam menyampaikan pengakuan kesalahan

Judul Berita: Fakta-fakta Pagar Laut di Bekasi yang Disambangi Menteri Prabowo Jurnalis: Andi Hidayat		
STRUKTUR SINTAKSIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>Headline</i>	Fakta-fakta Pagar Laut di Bekasi yang Disambangi Menteri Prabowo	Judul tersebut menunjukkan adanya temuan atau bukti mengenai pagar laut di Bekasi. Hal ini cenderung menonjolkan tindakan pemerintah dalam menangani kasus pagar laut di Bekasi.
<i>Lead</i>	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid, melakukan sidak pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).	Berita ini juga terdapat unsur <i>lead</i> . <i>Lead</i> berikut masih berkaitan dengan <i>headline</i> yang berfokus pada unsur <i>who</i> . <i>Lead</i> tersebut menonjolkan Menteri Nusron Wahid mengenai tindakannya yang menangani kasus ini.
Latar Informasi	-	Berita ini tidak memuat latar informasi.
Kutipan Sumber	1. "Ini semua kalau ditotal jumlahnya 509 hektar. Jadi 509 ditambah 72, 581 hektar," kata Nusron saat meninjau Pagar Laut Bekasi, Selasa (4/2/2025). 2. "Kami nggak pernah menerbitkan sektifikat. Sektifikat orang dipakai. Ini otomatis kita hapus dalam peta. Sehingga itu kembali menjadi laut," jelasnya. 3. "Dan nggak mungkin kalau ini pejabat rendahan. Kenapa, Pak? Nggak mungkin pejabat rendahan bisa punya akses terhadap sistem kecuali dia kerjasama dengan hacker," kata Nusron. 4. "Jangan akal-akalan, ini materialnya laut. Jangan mengatakan ini dulu empang, ini dulu apalah. Kalau itu dulu empang, ini faktanya laut. Sehingga ini kalau itu diempang masuk kategori tanah musnah," tegasnya. 5. "Kalau yang bersangkutan keberatan, kami akan datang ke pengadilan untuk minta penetapan supaya SKGB-nya dibatalkan oleh, ada perintah dari pengadilan, ditetapkan	Terdapat 14 kutipan sumber yang berupa 6 kutipan langsung dan 8 kutipan tidak langsung dari narasumber. Kutipan sumber dalam berita ini hanya memuat satu narasumber, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid. Kutipan sumber mengarahkan pembaca untuk memahami sudut pandang pemerintah yang menekankan pemerintah sebagai aktor dengan menunjukkan ketegasan dalam menindak kasus pagar laut.

pengadilan. Kemudian pengadilan memerintahkan kepada BPN Bekasi untuk membatalkan SHGB atas nama PT. CL dan PT. MAN," tegasnya.

6. "Setelah kita buka di dokumen dulu, ngakunya ini empang. Setelah kita lihat dengan fakta mata terakhir, mata kita semua, kita mau semua ini, kita saksikan, ini bukan empang," tegasnya.
7. Dalam sidaknya, ia mengungkapkan beberapa fakta tentang pagar laut Bekasi. Pertama, ia menyebut luas pagar laut yang terpasang seluas 581 hektar (ha) lahan dari Pagar Laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
8. Nusron merinci, mulanya ada 509 pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya. Akan tetapi, pihaknya menemukan sebanyak 72 sertifikat Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) warga yang diklaim pihak tidak dikenal ke laut.
9. Nusron mengatakan, 509 ha tanah di areal pagar laut tercatat sejak 2013 hingga 2017. Sementara 72 ha lainnya, diambil dari NIB warga sekitar yang terbit Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021 yang kemudian peta bidangnya dipindah ke laut.
10. Nurson mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 72 ha tanah yang dicatut milik warga sekitar.
11. Hal itu ia ungkap menyusul temuan ATR/BPN ihwal pemindahan 89 bidang tanah darat milik 84 warga setempat ke laut. Nusron mengatakan, semula hanya tercatat 11 ha NIB dari hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021.
12. Tetapi saat ini, kata Nusron, tercatat sebanyak 72 ha lahan darat milik warga dipindahkan ke laut. Ia mengatakan,

	ada 11 pihak dibalik pemindahan dan penyerobotan PTSL milik warga. 13. Nusron mengungkap, lokasi pemagaran di Bekasi adalah laut, bukan empang sebagaimana yang diklaim perusahaan pemilik pagar tersebut. 14. Nusron mengatakan, kedua perusahaan tersebut menerbitkan SHGB di laut dalam kurun waktu 2013 hingga 2017. Setelah ia buka dokumen penerbitan SHGB, luas lahan laut yang dipagari diklaim sebagai empang.	
Pernyataan	1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid, melakukan sidak pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025). 2. Selain itu, Nusron menduga ada oknum pejabat tinggi kementeriannya dibalik kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 3. Nusron bahkan tak segan membawa kasus pagar laut ke pengadilan. Hal itu menjadi solusi terakhir jika PT Cikarang Listrindo (CL) dan PT. Mega Agung Nusantara (MAN) enggan membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pesisir laut Bekasi.	Berita ini terdapat 3 pernyataan. Pernyataan tersebut menjelaskan perkembangan kasus pagar laut di Bekasi. Wartawan menekankan bahwa kasus tersebut diduga melibatkan oknum pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum apabila yang terlibat tidak membatalkan SHGB. Melalui penyampaian tersebut, wartawan mengarahkan pembaca pada pemahaman bahwa kasus pagar laut tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga mengindikasikan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Penutup	Adapun berikut rincian luas lahan Pagar Laut Bekasi yang milik PT CL dan PT MAN menurut temuan Kementerian ATR/BPN: 1. PT. Cikarang Listrindo 78 Bidang dengan Luas 90,159 ha. Aapun perusahaan ini memiliki 57 bidang dengan luas 64,0645 di luar garis pantai. Sementara di dalam garis pantai 21 Bidang dengan Luas 26.0954 Ha 2. PT. Mega Agung Nusantara 268 Bidang Luas 419.635 ha. Adapun perusahaan ini memiliki 211 bidang dari luar garis pantai	Penutup berita ini adalah rincian luas lahan Pagar Laut Bekasi yang milik PT CL dan PT MAN menurut temuan Kementerian ATR/BPN. Media menunjukkan bahwa berita ini hasil temuan resmi pemerintah dan membuat pembaca dapat lebih mempercayai informasi yang disertakan oleh bukti secara rinci.

	211 bidang dengan luas 346.382 Ha. Sementara di dalam garis pantai 57 bidang dengan luas 73,253 Ha.	
STRUKTUR SKRIP		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>What</i>	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid, melakukan sidak pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	Apakah yang dibahas dalam berita tersebut?
<i>When</i>	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid, melakukan sidak pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).	Kapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid, melakukan sidak pagar laut?
<i>Where</i>	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid, melakukan sidak pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	Di manakah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid, melakukan sidak pagar laut?
<i>Who</i>	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid, melakukan sidak pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).	Siapakah yang melakukan sidak pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat?
<i>Why</i>	1. Nusron merinci, mulanya ada 509 pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya. Akan tetapi, pihaknya menemukan sebanyak 72 sertifikat Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) warga yang diklaim pihak tidak dikenal ke laut. 2. Nusron mengatakan, 509 ha tanah di areal pagar laut tercatat sejak 2013 hingga 2017. Sementara 72 ha lainnya, diambil dari NIB warga sekitar yang terbit Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021 yang kemudian peta bidangnya dipindah ke laut.	Mengapa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid melakukan sidak pagar lagi di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat?

	- Selain itu, Nusron menduga ada oknum pejabat tinggi kementeriannya dibalik kasus pagar laut. - Nusron mengungkapkan, lokasi pemagaran di Bekasi adalah laut, bukan empang sebagaimana yang diklaim perusahaan pemilik pagar tersebut.	
<i>How</i>	Nusron bahkan tak segan membawa kasus pagar laut ke pengadilan. Hal itu menjadi solusi terakhir jika PT Cikarang Listrindo (CL) dan PT. Mega Agung Nusantara (MAN) enggan membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pesisir laut Bekasi. "Kalau yang bersangkutan keberatan, kami akan datang ke pengadilan untuk minta penetapan supaya SKGB-nya dibatalkan oleh, ada perintah dari pengadilan, ketetapan pengadilan. Kemudian pengadilan memerintahkan kepada BPN Bekasi untuk membatalkan SHGB atas nama PT. CL dan PT. MAN," tegasnya.	Bagaimanakah menurut Nusron Wahid setelah mengungkapkan lokasi pemagaran di Bekasi adalah laut, bukan empang?
STRUKTUR TEMATIK		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Detail	- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid, melakukan sidak pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025). - Selain itu, Nusron menduga ada oknum pejabat tinggi kementeriannya dibalik kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. - Nusron mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 72 ha tanah yang dicatut milik warga sekitar. Ia pun tak segan menindak tegas pegawai ART/BPN yang terbukti berperan dalam kasus tersebut.	Hal tersebut dikarenakan dalam berita menjelaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid melakukan sidak pagar laut di Bekasi. Kemudian, beliau menemukan adanya bukti berupa sertifikat.

	4. Adapun berikut rincian luas lahan Pagar Laut Bekasi yang milik PT CL dan PT MAN menurut temuan Kementerian ATR/BPN: 1. PT. Cikarang Listrindo 78 Bidang dengan Luas 90,159 ha. Adapun perusahaan ini memiliki 57 bidang dengan luas 64,0645 di luar garis pantai. Sementara di dalam garis pantai 21 Bidang dengan Luas 26.0954 Ha 2. PT. Mega Agung Nusantara 268 Bidang Luas 419.635 ha. Adapun perusahaan ini memiliki 211 bidang dari luar garis pantal 211 bidang dengan luas 346.382 Ha. Sementara di dalam garis pantai 57 bidang dengan luas 73,253 Ha.	
Koherensi	Kami nggak pernah menerbitkan sektifikat. Sektifikat orang dipakai. Ini otomatis kita hapus dalam peta. Sehingga itu kembali menjadi laut,	Koherensi sebab-akibat: sehingga. Koherensi sebab-akibat tersebut menunjukkan tindakan logis pemerintah dalam menangani kasus ini.
Bentuk Kalimat	1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid, melakukan sidak pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025). 2. Dalam sidaknya, ia mengungkap beberapa fakta tentang pagar laut Bekasi. 3. Kementerian ATR/BPN akan mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 72 ha tanah yang dicatut milik warga sekitar. Ia pun tak segan menindak tegas pegawai ART/BPN yang terbukti berperan dalam kasus tersebut. 4. Nusron bahkan tak segan membawa kasus pagar laut ke pengadilan. 5. Nusron mengatakan, kedua perusahaan tersebut menerbitkan SHGB di laut dalam kurun waktu 2013 hingga 2017. Setelah ia buka dokumen penerbitan	Kalimat aktif: melakukan sidak, mencabut, menindak, membawa, buka, menerbitkan, mengungkap. Kalimat tersebut adalah kalimat aktif yang menunjukkan peran aktif pemerintah dalam menangani kasus ini.

	SHGB, luas lahan laut yang dipagari diklaim sebagai empang.	
Kata Ganti	1. Kami nggak pernah menerbitkan sektifikat. Sektifikat orang dipakai. Ini otomatis kita hapus dalam peta. Sehingga itu kembali menjadi laut. 2. Akan tetapi, pihaknya menemukan sebanyak 72 sertifikat Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) warga yang diklaim pihak tidak dikenal ke laut. 3. Setelah kita buka di dokumen dulu, ngakunya ini empang. Setelah kita lihat dengan fakta mata terakhir, mata kita semua, kita mau semua ini, kita saksikan, ini bukan empang, 4. Dalam sidaknya, ia mengungkap beberapa fakta tentang pagar laut Bekasi. Pertama, ia menyebut luas pagar laut yang terpasang seluas 581 hektar (ha) lahan dari Pagar Laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	1. Kata ganti orang pertama jamak: kami, kita. Kata “kami, kita” merujuk pada Kementerian ATR/BPN. 2. Kata ganti orang ketiga tunggal: ia. Kata “ia” merujuk pad Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid. 3. Kata ganti kepemilikan: -nya. Kata “-nya” merujuk pada Kementerian ATR/BPN.
STRUKTUR RETORIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Kata/idiom	1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid, melakukan sidak pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025). 2. Selain itu, Nusron menduga ada oknum pejabat tinggi kementeriannya dibalik kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 3. "Jangan akal-akalan, ini materialnya laut. Jangan mengatakan ini dulu empang, ini dulu apalah. Kalau itu dulu empang, ini faktanya laut. Sehingga ini kalau itu diempang masuk kategori tanah musnah," tegasnya.	1. Sidak: inspeksi mendadak atau pemeriksaan secara tiba-tiba oleh pihak berwajib 2. Oknum: seseorang atau individu yang melakukan pelanggaran 3. Akal-akalan: usaha licik atau seseorang yang memiliki cara untuk menghindari aturan Penggunaan kata <i>sidak</i> membangun kesan bahwa pemerintah melakukan penyelidikan dengan datang secara langsung ke lokasi. Kemudian, kata <i>oknum</i> dan frasa <i>akal-akalan</i> menunjukkan adanya pihak yang terlibat dalam kasus ini dengan berbuat curang atau alasan yang dibuat-buat untuk mengelak dari kebenaran.

Gambar



Gambar tersebut adalah gambar pagar laut di di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gambar tersebut memberikan penjelasan bahwa memang pagar laut tersebut berada di tengah laut, bukan di empang.



Judul Berita: Bareskrim Ungkap 93 Dokumen SHM Dipalsukan di Kasus Pagar Laut Bekasi Jurnalis: Rumondang Naibaho		
STRUKTUR SINTAKSIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>Headline</i>	Bareskrim Ungkap 93 Dokumen SHM Dipalsukan di Kasus Pagar Laut Bekasi	Judul berita ini menunjukkan tokoh utama, yaitu bareskrim polri. Dalam hal ini menunjukkan keberhasilan penegak hukum dalam menemukan bukti, yaitu dengan mengungkapkan 93 dokumen SHM yang dipalsukan.
<i>Lead</i>	Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) di perairan Bekasi, tepatnya di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi. Polisi menemukan adanya 93 SHM yang dipalsukan di pagar laut Bekasi.	<i>Lead</i> tersebut masih berkaitan dengan <i>headline</i> . <i>Lead</i> berita ini berfokus pada unsur <i>who</i> yang menunjukkan Bareskrim Polri sebagai aktor.
Latar Informasi	Sebelumnya, Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Penyelidikan dilakukan setelah menerima laporan dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pekan lalu.	Kata “sebelumnya” sebagai penanda bahwa terdapat informasi tambahan yang masih berkaitan dengan peristiwa di berita ini.
Kutipan Sumber	1. "Diperoleh data dan fakta bahwa diduga modus operandi yang dilakukan oleh para oknum atau pelaku adalah mengubah data 93 SHM," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (14/2/2025). 2. "Diduga para pelaku merubah data subjek atau nama pemegang hak, dan merubah data objek atau lokasi yang sebelumnya berada di darat menjadi berlokasi di laut, dengan jumlah yang lebih luas, luasan yang lebih luas dari aslinya," ungkapny.	Dalam berita ini terdapat 6 kutipan sumber yang berupa 4 kutipan langsung dan 2 kutipan tidak langsung. Kutipan sumber dalam berita ini hanya memuat satu narasumber, yaitu Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro. Kutipan sumber tersebut cenderung menonjolkan polisi sebagai aktor yang telah bertindak secara serius dalam menangani kasus ini.

	3. "Penyidik dalam waktu dekat juga akan menggelarkan untuk lebih lanjut apakah perkara ini bisa dilanjutkan ke penyelidikan atau tidak, tapi tentu saja ini juga akan lebih lanjut setelah data-data ataupun bahan penyelidikan kita terkumpul semua," jelas dia. 4. "Mulai hari ini, tim sudah melaksanakan upaya penyelidikan, yaitu dengan kami menurunkan beberapa anggota, sekarang sedang mengumpulkan bahan-bahan keterangan termasuk barang-barang bukti yang bisa kita gunakan untuk proses lebih lanjut," kata Djuhandani, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2). 5. Djuhandani mengatakan modus yang dilakukan para terduga pelaku memalsukan SHM ialah dengan cara merevisi titik koordinat yang sejatinya di daratan menjadi di laut. 6. Saat ini, kata Djuhandani, pihaknya masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pemalsuan dokumen tersebut.	
Pernyataan	1. Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) di perairan Bekasi, tepatnya di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi. Polisi menemukan adanya 93 SHM yang dipalsukan di pagar laut Bekasi. 2. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik Bareskrim dalam kasus ini. Para pihak yang sudah dipanggil mulai dari pelapor, ketua, hingga anggota mantan panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas penerbitan 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Sagarajaya. 3. Polisi juga telah memeriksa saksi dari kalangan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bekasi serta pegawai pada	Berita ini terdapat 4 pernyataan yang 2 di antaranya termasuk pada bagian unsur <i>lead</i> dan latar informasi. pernyataan tersebut menekankan bahwa penyidik telah memeriksa berbagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan penerbitan sertifikat, mulai dari pelapor, mantan panitia PTSL sampai pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bekasi serta pegawai pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Oleh karena itu, pernyataan tersebut memberikan kesan bahwa pemerintah telah bekerja dengan serius dan sistematis dalam menanganai kasus ini dengan

	Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 4. Sebelumnya, Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Penyelidikan dilakukan setelah menerima laporan dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pekan lalu.	mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkapkan fakta dalam kasus pagar laut di Bekasi.
Penutup	"Mulai hari ini, tim sudah melaksanakan upaya penyelidikan, yaitu dengan kami menurunkan beberapa anggota, sekarang sedang mengumpulkan bahan-bahan keterangan termasuk barang-barang bukti yang bisa kita gunakan untuk proses lebih lanjut," kata Djuhandani, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2).	Penutup berita ini adalah kalimat langsung dari Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, mengenai bareskrim polri melakukan tindakan atau proses lebih lanjut mengenai kasus pagar laut ini. Kutipan sumber tersebut menonjolkan Polisi yang terus melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang bisa digunakan untuk menangani kasus ini.
STRUKTUR SKRIP		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
<i>What</i>	Polisi menemukan adanya 93 SHM yang dipalsukan di pagar laut Bekasi.	Apakah yang dibahas dalam berita tersebut?
<i>When</i>	"Diperoleh data dan fakta bahwa diduga modus operandi yang dilakukan oleh para oknum atau pelaku adalah mengubah data 93 SHM," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (14/2/2025) .	Kapan Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan kepada wartawan mengenai Diperoleh data dan fakta bahwa diduga modus operandi yang dilakukan oleh para oknum?
<i>Where</i>	Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) di perairan Bekasi, tepatnya di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi.	Di manakah kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) dalam berita tersebut?
<i>Who</i>	Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) di perairan Bekasi, tepatnya di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi.	Siapakah yang menyelidiki kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat?

<i>Why</i>	"Diduga para pelaku merubah data subjek atau nama pemegang hak, dan merubah data objek atau lokasi yang sebelumnya berada di darat menjadi berlokasi di laut, dengan jumlah yang lebih luas, luasan yang lebih luas dari aslinya," ungkapnya.	Mengapa Bareskrim Polri menyelidiki kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat?
<i>How</i>	Djuhandani mengatakan modus yang dilakukan para terduga pelaku memalsukan SHM ialah dengan cara merevisi titik koordinat yang sejatinya di daratan menjadi di laut.	Bagaimanakah cara terduga melakukan pemalsuan SHM?
STRUKTUR TEMATIK		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Detail	Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik Bareskrim dalam kasus ini. Para pihak yang sudah dipanggil mulai dari pelapor, ketua, hingga anggota mantan panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas penerbitan 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Sagarajaya.	Hal tersebut dikarenakan dalam berita menjelaskan polisi telah menemukan barang bukti berupa pemalsuan dokumen. Kemudian, polisi akan melakukan proses lebih lanjut untuk menangani kasus ini.
Koherensi	Penyelidikan dilakukan setelah menerima laporan dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pekan lalu.	Koherensi sebab akibat: setelah. Koherensi sebab-akibat tersebut cenderung menunjukkan tindakan polisi yang tanggap atau cepat dalam menangani kasus ini.
Bentuk Kalimat	1. Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) di perairan Bekasi, tepatnya di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi. Polisi menemukan adanya 93 SHM yang dipalsukan di pagar laut Bekasi. 2. Polisi juga telah memeriksa saksi dari kalangan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bekasi serta pegawai pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 3. Djuhandani mengatakan modus yang dilakukan para terduga pelaku memalsukan SHM ialah dengan cara merevisi titik koordinat yang sejatinya di daratan menjadi di laut.	1. Kalimat aktif: menyelidiki, menemukan, memeriksa, mengatakan, penyelidikan, menurunkan, mengumpulkan. 2. Kalimat pasif: dilakukan. Kalimat aktif dalam kutipan tersebut menunjukkan polisi sebagai aktor yang bertindak serius yang dilakukan polisi dalam menangani kasus ini.

	4. Saat ini, kata Djuhandani, pihaknya masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pemalsuan dokumen tersebut. 5. Sebelumnya, Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. 6. Mulai hari ini, tim sudah melaksanakan upaya penyelidikan, yaitu dengan kami menurunkan beberapa anggota, sekarang sedang mengumpulkan bahan-bahan keterangan termasuk barang-barang bukti yang bisa kita gunakan untuk proses lebih lanjut. 7. Penyelidikan dilakukan setelah menerima laporan dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pekan lalu.	
Kata Ganti	1. Saat ini, kata Djuhandani, pihaknya masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pemalsuan dokumen tersebut. 2. Mulai hari ini, tim sudah melaksanakan upaya penyelidikan, yaitu dengan kami menurunkan beberapa anggota, sekarang sedang mengumpulkan bahan-bahan keterangan termasuk barang-barang bukti yang bisa kita gunakan untuk proses lebih lanjut. 3. "Penyidik dalam waktu dekat juga akan menggelarkan untuk lebih lanjut apakah perkara ini bisa dilanjutkan ke penyelidikan atau tidak, tapi tentu saja ini juga akan lebih lanjut setelah data-data ataupun bahan penyelidikan kita terkumpul semua," jelas dia.	1. Kata ganti kepemilikan: -nya. Kata "-nya" merujuk pada Bareskrim Polri. 2. kata ganti orang ketiga tunggal: dia. Kata "dia" merujukpada Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro. 3. kata ganti orang pertama jamak: kami. Kata "kami" merujuk pada Bareskrim Polri.
STRUKTUR RETORIS		
Komponen	Hasil Pengamatan	Interpretasi
Kata/idiom	"Diperoleh data dan fakta bahwa diduga modus operandi yang dilakukan oleh para oknum atau pelaku adalah mengubah data 93 SHM," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum)	1. Modus operandi: cara seseorang atau kelompok yang melakukan kejahatan terhadap suatu hal. 2. Oknum: seseorang atau individu.

	Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (14/2/2025).	3. Pemalsuan dokumen: tindakan memalsukan, mengubah, atau manipulasi dokumen. 4. Penyelidikan: mencari kebenaran atau bukti mengenai suatu hal yang diselidiki. Penggunaan frasa <i>modus operandi</i> dan <i>pemalsuan dokumen</i> kesan negatif terhadap pelaku dikarenakan menunjukkan tindakan yang disengaja dan telah direncanakan. Kata “penyelidikan” memberikan kesan positif terhadap pemerintah karena menunjukkan polisi berupaya untuk menemukan kebenaran.
Gambar		Gambar tersebut adalah Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro. Gambar tersebut dapat membangun kepercayaan pembaca dan menegaskan narasumber sebagai pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini.

Bareskrim Polri Tetapkan 9 Tersangka di Kasus Pagar Laut Bekasi



Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo (Ondang/detikcom)

Jakarta -

Polisi telah menetapkan sembilan orang menjadi tersangka di kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) [pagar laut](#) di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi. Dua di antaranya kepala desa (kades) dan mantan Kades Segarajaya.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebutkan penetapan tersangka dilakukan pihaknya setelah melakukan gelar perkara pada Kamis, 20 Maret 2025.

"Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, kemudian dari wasidik, kemudian dari penyidik madya, kita sepakat menetapkan sembilan orang tersangka," kata Djuhandhani kepada wartawan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/5/2025).

Sembilan orang tersangka tersebut adalah:

1. MS selaku eks Kades Segarajaya;
2. AR selaku Kades Segarajaya tahun 2023-saat ini;
3. GM selaku Kasie Pemerintahan di kantor Desa Segarajaya;
4. Y selaku staf Desa Segarajaya;
5. S selaku staf Desa Segarajaya,
6. AP selaku ketua tim *support* PTSL;
7. GG selaku petugas ukur tim *support* PTSL;
8. MJ selaku operator komputer;
9. HS selaku tenaga pembantu di tim *support* program PTSL;

Djuhandhani menuturkan pihaknya telah memeriksa sekitar 40 orang saksi dalam perkara itu. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah bukti kasus pemalsuan dokumen itu.

"Di samping itu bukti-bukti lain juga kita dapatkan dari labfor (laboratorium forensik), di mana pernah kami sampaikan bahwa ini adalah dengan modus merubah sertifikat, merubah sertifikat di mana diubah objek maupun subjek sertifikat tersebut," jelas Djuhandhani.

Baca juga: [Bareskrim Kantongi Identitas Tersangka Kasus Pagar Laut di Bekasi](#)

Selanjutnya, dia mengatakan para tersangka akan menjalani pemeriksaan. Keterangan mereka untuk melengkapi berkas perkara kasus itu.

"Selanjutnya, penyidik akan melaksanakan upaya-upaya paksa yaitu dengan pemanggilan, pemeriksaan dan lain sebagainya, secepatnya agar segera dapat kita berkas dan untuk selanjutnya kami teruskan ke JPU," tutur dia.

Sebagai informasi, pada perkara ini polisi menemukan adanya 93 SHM yang dipalsukan di pagar laut Bekasi. Sertifikat tanah itu digadaikan kepada bank swasta.

"Betul, 93 sertifikat yang dipindahkan. Jadi seperti kami sampaikan dulu bahwa ini adalah objek yang dipindah, dimana sertifikatnya adalah sertifikat di darat kemudian dirubah subjek maupun objeknya, dipindah ke laut dengan luasan yang lebih luas lagi," pungkas dia.

(ond/zap)

KKP Ungkap Pagar Laut di Bekasi Tak Berizin, Pemilik Sudah Diketahui



Ilustrasi pagar laut/Foto: Istimewa

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan pagar yang membentang di perairan Bekasi tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto.

Doni mengatakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menyurati pemilik pagar laut di Bekasi lantaran tidak mengantongi izin KKPRL dari KKP. Surat tersebut telah dilayangkan sejak 19 Desember 2024 lalu.

"Kita itu tanggal 19 Desember sudah kirim surat (dari) PSDKP. Jadi sekarang memang lagi ada proses penegakan hukum karena ada indikasi pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin KKPRL," kata Doni saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Doni menjelaskan pemilik pagar laut di Bekasi berbeda dengan pemilik pagar laut di Tangerang. Meski begitu, dia belum mau membeberkan nama pemiliknya karena masih dalam proses investigasi.

"Pemiliknya kita tahu ini beda nih (dengan yang di Tangerang). Jadi pemiliknya kita tahu, tapi saya nggak bisa sebut siapa pemiliknya. Kalau kita sih sudah berkirim surat, sudah memberikan permintaan untuk penghentian kegiatannya," imbuh Doni.

Doni pun menerangkan sampai saat ini pihaknya belum menerima surat balasan dari pemilik pagar laut di Bekasi. Ke depan, KKP akan tetap menegakkan hukum apabila tak kunjung mendapat balasan. Salah satu upaya penegakkannya dengan penyegelan.

"Ya belum. Karena ini kita mau follow up lagi. (Ada penyegelan ke depan?) Pokoknya tenang aja, kita pasti (penegakkan hukum). Saya cuma bisa bilang gini, Pak Menteri kalau urusan ekologi, urusan penegakan hukum, terutama tentang pemanfaatan ruang laut yang tidak berizin, sudah banyak yang beliau lakukan penyegelan laut oleh PSDKP. Di resort Batam, terus kapal pasir. Jadi kalau urusan kayak gini, tetap harus hati-hati. Karena nggak bisa gebyah uyah, kadang-kadang yang kita hadapin perusahaan, kadang-kadang warga yang nggak paham," imbuh Doni.

(acd/acd)



Pagar Misterius juga Ditemukan di Laut Bekasi, KKP Siap Segel



Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipung) usai memimpin penyegelan pemagaran laut 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. (ANTARA/Harianto)

Bekasi - Pagar yang dibangun di atas permukaan laut juga ditemukan di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar). [Kementerian Kelautan dan Perikanan](#) (KKP) siap menyegel pagar di perairan [Bekasi](#), Jawa Barat bila tidak memiliki izin dasar berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).

Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono menegaskan pihaknya siap melakukan penyegelan terhadap pagar di laut jika tidak memiliki PKKPRL.

"Jika tidak ada izin PKKPRL, (pagar di laut) tetap disegel," ujar Pung Nugroho Saksono dilansir *Antara*, Selasa (14/1/2025).

Ipung, sapaan akrab Pung, mengatakan pihaknya segera meninjau ke lapangan. KKP akan mengecek pemagaran di wilayah perairan Bekasi itu.

Meski begitu, ia belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai adanya pemagaran di perairan Bekasi tersebut. Namun KKP menegaskan siap melakukan penyegelan bila pagar tersebut tidak memiliki PKKPRL.

Sebelumnya, marak pemberitaan adanya pemagaran di laut berbahan bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Di pagar laut tersebut tampak ribuan batang bambu yang terpancang secara rapi di wilayah perairan. Terlihat dua deretan bambu yang menopang gundukan tanah di atas susunan pagar bambu.

Jejeran bambu tersebut membentuk garis panjang menyerupai tanggul, dengan hamparan perairan di tengahnya yang mirip sungai.

Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak yang berwenang terkait hal tersebut.

Sebelumnya, pagar laut ditemukan di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut memiliki panjang sekitar 30,16 kilometer (km).

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menyampaikan pemagaran laut di pesisir Kabupaten Tangerang membentang sepanjang 30,16 km. Pemasangan pagar laut tersebut mencakup enam wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang.

"Panjang 30,16 km ini meliputi enam kecamatan, tiga desa di Kecamatan Kronjo, kemudian tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, dan tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti dalam diskusi publik di gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (7/1).

Lihat Video: Ini Bentuk Pagar Misterius di Laut Tangerang yang Kini Disegel KKP

(jbr/imk)



Benar Saja, Pagar Laut di Bekasi Ternyata buat Reklamasi



Foto: Andi Hidayat

Jakarta -

Pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) buka-bukaan soal alasan pemagaran laut yang ditaksir seluas 60 hektar (ha) di wilayah perairan Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kuasa Hukum PT TRPN, Deolipa Yumara mengatakan, pihaknya hendak melakukan reklamasi untuk mengelola pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya. Pengelolaan PT TRPN dilakukan melalui Sertifikat Hak Milik (SHM) milik warga sekitar.

"Kami lagi mencoba mengelola yang punya masyarakat ini tadinya, supaya nanti kami dapat kuasa untuk melakukan pengelolaan. Tapi kan ternyata kan, ini clear ditutup. Mau nggak mau kami akan tetap bekerja di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan. Harapan kami nanti ini pelabuhan jadi besar," kata Deolipa kepada wartawan di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/2/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi ini tetap laut dan kami akan berusaha, karena di bidang perikanan, tentu kami akan mencoba membuat pelabuhan besar di sini kerja sama tentunya dengan pemerintah Jawa Barat," tambahnya.

Hari ini, kata Deolipa, PT TRPN melakukan pembongkaran pagar laut dan tanah yang kadung direklamasi dengan estimasi pengerjaan paling lambat 10 hari. Namun begitu, ia mengaku PT TRPN akan tetap mengelola PPI Paljaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Setelah ini nanti kami bongkar, kami rapihkan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku termasuk semua perizinan akan kami upayakan baik di tingkat pusat maupun gubernur," jelasnya.

Ia menambahkan, pembongkaran akan dilakukan secara mandiri dengan pendampingan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Dari beberapa waktu lalu, mengenai masalah perizinan ada kelirunya. Tapi kan semua orang bisa keliru kan. Jadi kita minta maaf terhadap hal ini dan sudah terjadi ini kan, jadi kita minta maaf. Tapi kita mencoba untuk memperbaiki, semoga kemudian jadi harapannya menjadi baik kemudian bisa kemudian kami tidak terlalu dipersalahkan," tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan, pembongkaran mandiri yang dilakukan PT TRPN menjadi bagian dari sanksi administrasi.

"Jadi memang kami diskusi dengan Abang, lawyer (Deolipa), menyampaikan, 'Bang, karena Abang yang memasang, sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran'. Setuju beliau karena itu tadi, beliau sadar hukum bahwa ini keliru," kata Ipunk.

Untuk diketahui, PT TRPN sendiri memasang pagar laut di Bekasi untuk melakukan reklamasi dengan tujuan kegiatan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Penataan meliputi fasilitas pokok seperti pendalaman kolam labuh, pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur. Di samping itu ada juga penataan toko, pembangunan kantor, serta pengaktifan tempat lelang maupun cold storage.

PT TRPN dikabarkan menyewa lahan yang ada di kawasan PPI Paljaya seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun dengan kompensasi sebesar Rp 2,6 miliar dan ditambah beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan.

Sebelumnya, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan, kegiatan ini dikategorikan reklamasi karena kegiatan dilakukan di luar garis pantai berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

"Dari hasil penyidikan, kegiatan reklamasi ini terindikasi melanggar Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja," kata Sumono dalam keterangannya, Rabu (15/1).

Simak juga Video 'Menteri Nusron Pecat 6 Pegawai Buntut Polemik Pagar Laut Tangerang':

(acd/acd)



Nusron Wahid Bakal Pecat Pegawai BPN Terlibat Kasus Pagar Laut di Bekasi



Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid (Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN)

Jakarta -

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut investigasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat, sudah selesai. Dia akan memecat pegawai BPN yang terlibat kasus tersebut.

Hal itu diungkap Nusron usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2). Nusron melaporkan perkembangan terkini terkait pertanahan, termasuk penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah Bekasi dan Tangerang dalam kasus pagar laut.

"Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan, ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi," kata Nusron saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir Antara, Selasa (18/2/2025).

Nusron menjelaskan bahwa modus operandi dalam kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut dilakukan oleh oknum pejabat di tingkat bawah. Kasus itu berawal dari adanya nomor induk bidang pada 89 sertifikat yang dimiliki oleh 84 orang dengan luas mencapai 11,6 hektare.

Ketika sertifikat itu dipindahkan ke laut, luasnya menjadi 79 hektare. Kemudian, kepemilikan sertifikat itu juga berubah dari 84 pemilik menjadi 11 pemilik, di mana salah satunya adalah oknum kepala desa setempat.

Nusron juga baru mengetahui bahwa 89 sertifikat itu didaftarkan melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Akun PTSL ini dapat dikelola oleh tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten, sehingga memberikan ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

"Yang memegang akun itu memang kalau nggak Kepala Kantor, Kepala Seksi. Nah ternyata karena ini program PTSL, saya baru dapat informasi, kalau program PTSL itu tim adjudikasi pun, tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten itu juga boleh mendapatkan akun," ucap Nusron.

Nusron menegaskan bahwa pejabat BPN yang diduga melakukan penyalahgunaan jabatan dalam kasus pagar laut bukan berasal dari eselon 1 dan eselon 2.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Nusron juga membahas mengenai tumpang tindih kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) yang sering terjadi akibat kesalahan administrasi pertanahan di masa lalu.

Menurut Nusron, banyak sertifikat yang terbit pada periode 1960-1987 tidak memiliki peta bidang tanah yang jelas, sehingga menimbulkan permasalahan kepemilikan di kemudian hari.

(fas/fas)



Pihak Perusahaan Ngaku Salah Bikin Pagar Laut di Bekasi



Foto: Andi Hidayat
Jakarta -

Pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui kesalahannya karena memasang pagar laut di perairan Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemasangan pagar laut ini dilakukan untuk kegiatan reklamasi dengan tujuan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya.

Kuasa Hukum PT TRPN Deolipa Yumara mengatakan, pihaknya melakukan reklamasi melalui pengelolaan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga sekitar. Namun begitu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kegiatan PT TRPN melanggar ketentuan karena tidak memenuhi izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

"Kami salah, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang, dan perizinan," kata Deolipa kepada wartawan di PPI Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Selasa (11/2/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Deolipa mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan reklamasi setelah pembongkaran yang dilakukan hari ini. Meski begitu, ia menekankan kegiatan reklamasi ke depan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Setelah ini nanti kami bongkar, kami rapihkan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku termasuk semua perizinan akan kami upayakan baik di tingkat pusat maupun gubernur," jelasnya.

Deolipa menambahkan, PT TRPN menargetkan pembongkaran pagar laut dan reklamasi paling lambat 10 hari yang dibantu dengan alat berat seperti ekskavator. Adapun penertiban kawasan pesisir yang dilakukan PT TRPN sepanjang 3,3 km yang ditaksir seluas 60 hektar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksiono (Ipunk) mengatakan, kegiatan pembongkaran yang dilakukan PT TRPN menjadi bagian dari kesadaran hukum. Adapun sebelumnya, pagar laut berbahan bambu di Bekasi ini disegel Ditjen PSDKP lantaran mengganggu akses melaut para nelayan sekitar dan ekosistem pesisir.

Ipunk mengatakan, PT TRPN mengakui kesalahannya dalam melakukan kegiatan reklamasi. Ia juga mengimbau pihak pemasang pagar laut untuk segera melakukan pembongkaran jika dinyatakan melanggar.

"Hari ini rencana kami menyaksikan dari pihak perusahaan PT TRPN yang akan melakukan pembongkaran. Jadi ini lebih ke inisiatif kesadaran hukum," kata Ipunk.

Simak juga Video 'Menteri Nusron Pecat 6 Pegawai Buntut Polemik Pagar Laut Tangerang':

(acd/acd)



Fakta-fakta Pagar Laut di Bekasi yang Disambangi Menteri Prabowo



Foto: Andi Hidayat/detikcom

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Nusron Wahid, melakukan sidak pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dalam sidaknya, ia mengungkap beberapa fakta tentang pagar laut Bekasi. Pertama, ia menyebut luas pagar laut yang terpasang seluas 581 hektar (ha) lahan dari Pagar Laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Nusron merinci, mulanya ada 509 pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya. Akan tetapi, pihaknya menemukan sebanyak 72 sertifikat Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) warga yang diklaim pihak tidak dikenal ke laut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini semua kalau ditotal jumlahnya 509 hektar. Jadi 509 ditambah 72, 581 hektar," kata Nusron saat meninjau Pagar Laut Bekasi, Selasa (4/2/2025).

Nusron mengatakan, 509 ha tanah di areal pagar laut tercatat sejak 2013 hingga 2017. Sementara 72 ha lainnya, diambil dari NIB warga sekitar yang terbit Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021 yang kemudian peta bidangnya dipindah ke laut.

Nusron mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 72 ha tanah yang dicatut milik warga sekitar. Ia pun tak segan menindak tegas pegawai ART/BPN yang terbukti berperan dalam kasus tersebut.

"Kami nggak pernah menerbitkan sertifikat. Sertifikat orang dipakai. Ini otomatis kita hapus dalam peta. Sehingga itu kembali menjadi laut," jelasnya.

Dugaan Oknum Pejabat Kementerian

Selain itu, Nusron menduga ada oknum pejabat tinggi kementeriannya dibalik kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hal itu ia ungkap menyusul temuan ATR/BPN ihwal pemindahan 89 bidang tanah darat milik 84 warga setempat ke laut. Nusron mengatakan, semula hanya tercatat 11 ha NIB dari hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021.

Tetapi saat ini, kata Nusron, tercatat sebanyak 72 ha lahan darat milik warga dipindahkan ke laut. Ia mengatakan, ada 11 pihak dibalik pemindahan dan penyerobotan PTSL milik warga.

"Dan nggak mungkin kalau ini pejabat rendahan. Kenapa, Pak? Nggak mungkin pejabat rendahan bisa punya akses terhadap sistem kecuali dia kerjasama dengan hacker," kata Nusron.

2 Perusahaan Pemilik Pagar Klaim Laut Sebagai Empang

Nusron mengungkap, lokasi pemagaran di Bekasi adalah laut, bukan empang sebagaimana yang diklaim perusahaan pemilik pagar tersebut.

"Jangan akal-akalan, ini materialnya laut. Jangan mengatakan ini dulu empang, ini dulu apalah. Kalau itu dulu empang, ini faktanya laut. Sehingga ini kalau itu diempang masuk kategori tanah musnah," tegasnya.

Nusron bahkan tak segan membawa kasus pagar laut ke pengadilan. Hal itu menjadi solusi terakhir jika PT Cikarang Listrindo (CL) dan PT. Mega Agung Nusantara (MAN) enggan membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pesisir laut Bekasi.

"Kalau yang bersangkutan keberatan, kami akan datang ke pengadilan untuk minta penetapan supaya SKGB-nya dibatalkan oleh, ada perintah dari pengadilan, ketetapan pengadilan. Kemudian pengadilan memerintahkan kepada BPN Bekasi untuk membatalkan SHGB atas nama PT. CL dan PT. MAN," tegasnya.

Nusron mengatakan, kedua perusahaan tersebut menerbitkan SHGB di laut dalam kurun waktu 2013 hingga 2017. Setelah ia buka dokumen penerbitan SHGB, luas lahan laut yang dipagari diklaim sebagai empang.

"Setelah kita buka di dokumen dulu, ngakunya ini empang. Setelah kita lihat dengan fakta mata terakhir, mata kita semua, kita mau semua ini, kita saksikan, ini bukan empang," tegasnya.

Adapun berikut rincian luas lahan Pagar Laut Bekasi yang milik PT CL dan PT MAN menurut temuan Kementerian ATR/BPN:

1. PT. Cikarang Listrindo 78 Bidang dengan Luas 90,159 ha. Adapun perusahaan ini memiliki 57 bidang dengan luas 64,0645 di luar garis pantai. Sementara di dalam garis pantai 21 Bidang dengan Luas 26.0954 Ha
2. PT. Mega Agung Nusantara 268 Bidang Luas 419.635 ha. Adapun perusahaan ini memiliki 211 bidang dari luar garis pantai 211 bidang dengan luas 346.382 Ha. Sementara di dalam garis pantai 57 bidang dengan luas 73,253 Ha.

(rrd/rrd)



Bareskrim Ungkap 93 Dokumen SHM Dipalsukan di Kasus Pagar Laut Bekasi



Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro (Rumondang/detikcom)

Jakarta - Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) di perairan Bekasi, tepatnya di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi. Polisi menemukan adanya 93 SHM yang dipalsukan di pagar laut Bekasi.

"Diperoleh data dan fakta bahwa diduga modus operandi yang dilakukan oleh para oknum atau pelaku adalah mengubah data 93 SHM," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik Bareskrim dalam kasus ini. Para pihak yang sudah dipanggil mulai dari pelapor, ketua, hingga anggota mantan panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas penerbitan 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Sagarajaya.

Polisi juga telah memeriksa saksi dari kalangan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bekasi serta pegawai pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Djuhandani mengatakan modus yang dilakukan para terduga pelaku memalsukan SHM ialah dengan cara merevisi titik koordinat yang sejatinya di daratan menjadi di laut.

"Diduga para pelaku merubah data subjek atau nama pemegang hak, dan merubah data objek atau lokasi yang sebelumnya berada di darat menjadi berlokasi di laut, dengan jumlah yang lebih luas, luasan yang lebih luas dari aslinya," ungkapnya.

Saat ini, kata Djuhandani, pihaknya masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan [pemalsuan dokumen](#) tersebut.

"Penyidik dalam waktu dekat juga akan menggelarkan untuk lebih lanjut apakah perkara ini bisa dilanjutkan ke penyelidikan atau tidak, tapi tentu saja ini juga akan lebih lanjut setelah data-data ataupun bahan penyelidikan kita terkumpul semua," jelas dia.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Penyelidikan dilakukan setelah menerima laporan dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pekan lalu.

"Mulai hari ini, tim sudah melaksanakan upaya penyelidikan, yaitu dengan kami menurunkan beberapa anggota, sekarang sedang mengumpulkan bahan-bahan keterangan termasuk barang-barang bukti yang bisa kita gunakan untuk proses lebih lanjut," kata Djuhandani, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2).

Simak juga Video Menteri KP soal Pagar Laut Dibongkar: Tunggu Dulu Dong, Itu Barang Bukti

(ond/ygs)



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ni Kadek Yunita Melansari, lahir di Denpasar pada 8 Mei 2004. Penulis merupakan putri bungsu dari pasangan I Made Purnata dan Ni Ketut Murniasih. Penulis memulai pendidikan pertama di TK Saraswati 1 Denpasar dan lulus pada 2010. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Saraswati 2 Denpasar dan lulus pada 2016. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SMP (SLUB) Saraswati 1 Denpasar dan lulus pada 2019. Berikutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 8 Denpasar dan lulus pada 2022. Pada 2022, penulis menempuh pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Pendidikan Ganesha pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Selama di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi dan kepanitiaan di kegiatan yang dilaksanakan HMJ BSID. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada penulis. Melalui kegiatan yang dilaksanakan di organisasi dan kepanitiaan, penulis belajar untuk berkomunikasi, bertanggung jawab, kepemimpinan, dan bekerja sama dengan tim. Dengan demikian, penulis memperoleh pengalaman yang juga mendukung proses perkuliahan.